



**MEMBINCANG ULANG PERAN SOSIAL POLITIK
ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM
DI ERA REFORMASI**



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY
300 LATHAM DRIVE
STANFORD, CALIF. 94305-5080

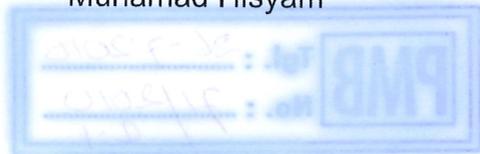


MEMBINCANG ULANG PERAN SOSIAL POLITIK ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DI ERA REFORMASI

Jakarta 11 Maret 2010



Editor
Muhamad Hisyam



Kerja sama

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa,
Tokyo University of Foreign Studies.
Pusat Kajian Islam dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Jakarta.

©2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Membincang Ulang Peran Sosial Politik Organisasi Keagamaan
Islam di Era Reformasi/ Editor Muhamad Hisyam, Jakarta: PMB-LIPI, 2010

xvi + 82 hlm; 14,8 x 21 cm

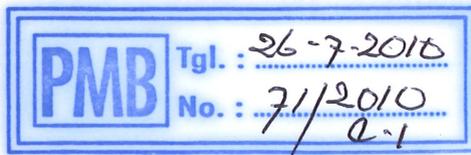
ISBN: 978-979-3584-46-1

1. Partai Politik Islam
2. Islam

297. 662



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232



PENGANTAR EDITOR

Memasuki orde reformasi, perubahan tidak saja terjadi pada tataran politik, melainkan juga pada hampir semua sendi kehidupan kemasyarakatan, termasuk keberagaman umat Islam. Terbukanya kebebasan berekspresi di era reformasi, sebagai antagon terhadap era orde baru, menjadikan wajah Islam di Indonesia menjadi semakin plural dan kompleks. Ini disebabkan oleh semakin beragamnya manifestasi Islam, baik sebagai kekuatan sosial politik maupun kultural. Kompleksitas itu menjadikan varian Islam di Indonesia tidak lagi dapat dipahami secara sederhana sebagai modernis dan tradisional. Gerakan Islam baru bermunculan dalam beragam bentuk dan manifestasinya, seperti partai politik, gerakan sosial keagamaan, organisasi massa, gerakan puritanisasi, gerakan fundamentalis, radikal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), gerakan Islam moderat, dan sebagainya. Sekedar menyebut contoh, organisasi keagamaan yang subur di era reformasi antara lain: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Dakwah Salafi, Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI), Jaringan Islam Liberal (JIL), Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Himpunan Pesantren dan Pengembangan Masyarakat (P3M), Gerakan Islam Transformatif (GIT) dan sebagainya. Kesemuanya itu muncul dan hidup di tengah masyarakat Indonesia, sebuah tipe masyarakat yang ramah, seperti kesuburan tanahnya, seperti dikatakan “biji apa saja di tanam di Indonesia, pasti tumbuh”. Di hadapan negara, kesemuanya ini merupakan kelompok civil society, kekuatan kelompok kewargaan yang berfungsi sebagai katalisator antara negara dengan warga negara dan antara warga negara dengan negara. Civil society mempunyai peran sangat penting dalam proses

demokratisasi, suatu tatanan kehidupan demokratis yang dicita-citakan dan diupayakan.

Munculnya banyak ragam gerakan Islam tersebut tentunya dapat dipandang sebagai memperkaya khazanah Islam di Indonesia. Tetapi implikasi yang hadir bersamaan dengan itu ialah kesulitan melihat peran yang sepanjang sejarah dimainkan oleh dua organisasi massa Islam besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dulu para pengamat dengan mudah melakukan identifikasi gerakan Islam dengan menggolongkannya menjadi Islam modernis dan Islam tradisional, yang merupakan representasi Muhammadiyah dan NU, sekarang identifikasi seperti itu tidak lagi dapat dilakukan. Terjadi transformasi, baik pemikiran maupun gerakannya, sehingga makin sulit pula melihat pola peran yang dimainkan oleh gerakan-gerakan itu. Apakah keragaman yang mewarnai gerakan Islam era reformasi telah merubah pola peran sosial politik ormas Islam arus utama, Muhammadiyah dan NU? Bagaimana peran sosial-politik yang dimainkan oleh gerakan Islam yang baru? Dua pertanyaan ini mendorong diselenggarakannya seminar sehari yang diselenggarakan di Widyagraha - LIPI, hari Kamis tanggal 11 Maret 2010.

Seminar ini diselenggarakan secara kolaboratif oleh tiga institusi, yaitu Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) - LIPI, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ICLAA), Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Tujuan seminar ini adalah mendiskusikan peran sosial-politik yang dimainkan oleh organisasi keagamaan Islam di era reformasi. Pembicara/pemakalah terdiri dari para sarjana yang kompeten dalam bidangnya masing-masing: Prof. Dr. Bachtiar

Effendy, Guru Besar Ilmu Politik, FISIP UIN Jakarta; Dr. Hendro Prasetyo, Peneliti Senior PPIM dan Dosen Fakultas Dakwah UIN Jakarta, Drs. Anas Saidi, MA., Peneliti Senior PMB-LIPI, Dr. Endang Turmudi, Sekretaris Jendral Pengurus Besar NU dan Peneliti Senior PMB-LIPI; dan Dr. Abdul Mu'ti, Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP. Muhammadiyah (2005-2010); Sekretaris Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP. Muhammadiyah (2007-2010); Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2002-2006), Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang. Peserta seminar terdiri dari para peneliti, dosen, intelektual, aktivis organisasi Islam dan aktifis LSM.

Muhamad Hisyam

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	i
Dr. Muhamad Hisyam	
DAFTAR ISI.....	v
SAMBUTAN SELAMAT DATANG	vii
Drs. Abdul Rachman Patji, MA	
SAMBUTAN REKAN KERJA SAMA.....	xi
Prof. Koji MIYAZAKI	
SAMBUTAN PEMBUKAAN	xiii
Prof. Dr. Lukman Hakim	
<i>Keynote Speech</i>	
MENCERMATI PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DI ERA REFORMASI	1
Prof. Dr. Bachtiar Effendy	
SESI I	
<i>CIVIL SOCIETY</i> ISLAM DAN MASALAH DEMOKRATISASI.....	11
A. <i>Civil Society</i> dan Demokrasi	11
Dr. Hendro Prasetyo	
B. <i>Civil Society</i> Islam dan Masalah Demokratisasi Di Indonesia: Sebuah Tinjauan	17
Drs. Anas Saidi, MA	
SESI II	
ORMAS ISLAM DAN PEMBERDAYAAN UMAT	41

**A.Pemberdayaan Masyarakat: Pengalaman
Pengalaman Nahdlatul Ulama41**
Dr. Endang Turmudi

**B.Ormas Islam dan Masalah Pemberdayaan Masyarakat:
Pengalaman Muhammadiyah57**
Dr. Abdul Mu'ti

PENUTUP 41
Dr. Muhamad Hisyam

==== **SAMBUTAN SELAMAT DATANG** ====

Drs. Abdul Rachman Patji, M.A.

Kepala PMB LIPI

Bismillaahirrahmaanirrohiim.

Yth. Wakil Kepala LIPI;

Yth. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau yang mewakili;

Yth. Prof. Koji MIYAZAKI, ILCAA TUFSS;

Yth. Dr. Kazuhiro ARAI

Yth. Direktur PPIM UIN Jakarta, Dr. Jajat Burhanudin;

Yth. Prof Bachtiar Effendy;

Yth. Prof. Taufik Abdullah;

Yth. Dr. M. Hisyam;

serta Bapak/Ibu undangan yang kami hormati.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Mengawali seminar hari ini, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, sehingga kita bisa hadir dalam seminar sehari ini yang bertajuk *Membincang Ulang Peran Sosial Politik Organisasi Keagamaan Islam di Era Reformasi*.

Tajuk seminar ini sangat relevan untuk didiskusikan. Selain organisasi Islam yang sudah mapan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, di Indonesia belakangan ini muncul pula berbagai organisasi Islam kontemporer dengan

corak visi dan misinya masing-masing yang telah berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, topik ini memang perlu untuk dibicarakan dalam level akademik.

Kami atas nama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, mengucapkan selamat datang kepada para pembicara dan peserta di kampus LIPI Gatot Subroto Jakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam seminar ini. Seminar ini terselenggara atas kerja sama PMB LIPI, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), serta Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Secara khusus, PMB LIPI dan ILCAA TUFS memang sedang melakukan kerja sama penelitian. Dalam kurun waktu 2007 – 2010, kedua lembaga riset ini melakukan penelitian dengan judul *The Emergence and Dynamics of Various Islamic Variants in Indonesia* atau "Muncul dan Berkembangnya Paham-paham Keagamaan Islam di Indonesia." Dalam kurun waktu ini, tim PMB sudah berkunjung tiga kali ke Jepang. Tim peneliti PMB juga sudah menerbitkan dua laporan terkait dengan penelitian tersebut. Selain itu, sebuah workshop pertama juga sudah digelar pada 30 Oktober 2008. Workshop tersebut juga dihadiri rekan-rekan dari Jepang. Episode akhir dari rangkaian kerja sama ini adalah workshop yang akan diadakan pada Juli 2010 di Jepang.

Kami merasa bangga atas kehadiran Wakil Kepala LIPI selaku Koordinator LIPI-JSPS Bilateral Research Program dibawah mana kegiatan kerjasama ini bernaung. Kami mohon perkenan beliau untuk memberikan sambutan dan sekaligus

membuka secara resmi seminar hari ini. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Koji MIYAZAKI Vice President Tokyo University of Foreign Studies dan Dr. Kazuhiro ARAI yang telah berkenan hadir pada seminar ini. Kepada Dr. Jajat Burhanudin, Direktur PPIM UIN Jakarta kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama dan perkenan beliau hadir dalam kesempatan ini. Secara khusus terima kasih kami tujukan kepada Prof. Dr. Bachtiar Effendy yang bersedia bertindak sebagai *keynote speaker* dalam seminar hari ini.

Akhirnya kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan seminar ini.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

=== SAMBUTAN REKAN KERJA SAMA ===

Prof. Dr. Koji MIYAZAKI

Vice President Tokyo University of Foreign Studies

Yth. Prof. Lukman Hakim;

Yth. Prof. Taufik Abdullah;

Yth. Prof. Bachtiar Effendy;

Yth. Dr Hisyam;

Yth. Dr Jajat Burhanudin;

Yth. Drs. Abdul Rachman Patji, M.A.

Seperti sudah disampaikan Pak Patji tadi, seminar ini diselenggarakan atas kerja sama Indonesia – Jepang. Dalam kerja sama ini, pihak Indonesia diwakili oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, sementara pihak Jepang diwakili oleh Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies (TUFS). Acara hari ini juga terselenggara berkat bantuan kerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. Seminar ini merupakan kolaborasi dari PMB LIPI yang melakukan penelitian dengan judul *The Emergence and Dynamics of Various Islamic Variants in Indonesia* dengan PPIM UIN yang melakukan kerja sama dengan ILCAA TUFS untuk kajian tentang *naskah Nusantara*.

Tema hari ini sangat menarik, termasuk bagi masyarakat Jepang. Tema yang disajikan hari ini tentu akan memberikan gambaran tentang perkembangan paham-paham Islam yang

sedang berkembang di Indonesia. Semoga seminar hari ini memberikan manfaat bagi kedua negara.

Sekian sambutan saya.

Terima kasih atas perhatiannya.



SAMBUTAN PEMBUKAAN

Prof. Dr. Lukman Hakim

Wakil Kepala LIPI

Yth. Prof. Koji MIYAZAKI;

Yth. Dr. Kazuhiro ARAI;

Yth. Prof. Taufik Abdullah;

Yth. Prof. Bahtiar Effendy;

Yth. Dr. Jajat Burhanudin;

Saudara-saudara, para peserta dan hadirin yang kami hormati.

Assalamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Terlebih dahulu saya meminta maaf karena seharusnya Kepala LIPI yang berdiri di sini dan menyampaikan sambutan pada acara pagi ini.

Kita harus bersyukur kepada Allah SWT, atas perkenannya pada saat ini kita dipertemukan dalam seminar yang bertema "Membincang Ulang Peran Sosial-politik Organisasi Keagamaan Islam di Era Refomasi" Sebagaimana tadi dikatakan, seminar ini terselenggara berkat kerja sama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, Research Institute of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta.

LIPI sendiri dalam 10 tahun terakhir terus menerus mengembangkan kerjasama baik dengan lembaga-lembaga riset

dan universitas-universitas di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang sifatnya temporal maupun permanen. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan ilmu sosial, bahwa kerja sama ini sangat diperlukan, khususnya dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena Indonesia memiliki *biodiversity* dan *biocultural* yang membutuhkan banyak jawaban dari berbagai kegiatan penelitian.

Seminar yang hari ini kita selenggarakan merupakan wujud kegiatan dari program kerja sama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Japan Society for Promotion of Sciences yang diberi nama "LIPI-JSPS Bilateral Research Program". Program ini telah dimulai sejak tahun 2005, meliputi riset kolaboratif dalam berbagai disiplin, yang jumlahnya mencapai puluhan topik riset, dan melibatkan berbagai pusat riset di LIPI. Kerja sama riset antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI dengan Reserach Institute for Languages and Cultures, Tokyo University of Foreign Studies ini berjudul: "*The Emergence and Dynamics of Various Islamic Variants in Indonesia*" dan telah berjalan selama tiga tahun. Dalam kerangka ini pula Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI mengajak serta bekerjasama dengan Pusat pengajian Islam dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Jakarta. Ini merupakan langkah yang sangat baik. Saya berharap kerjasama seperti ini tidak berhenti pada seminar ini, tetapi dapat dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan riset yang bermanfaat bagi kedua pusat ini. Atas nama LIPI saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atas kerjasama ini.

Mengenai topik seminar yang dipilih hari ini yaitu "Membincang Ulang Peran Sosial-Politik Organisasi

Keagamaan Islam di Era Reformasi” saya menganggap sangat tepat, karena ini relevan dengan situasi yang berkembang pada masa belakangan ini. Kalau kita mengikuti perkembangan yang ada di media massa, jelas sekali dapat dilihat terjadinya pergeseran meningkatnya peran organisasi sosial kemasyarakatan dan menurunnya peran organisasi sosial birokrasi. Oleh karena itu, terciptalah tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru dari pergeseran ini. Sejak bergulirnya reformasi lebih dari sepuluh tahun yang lalu, kita menyaksikan begitu banyak organisasi keagamaan maupun organisasi lainnya yang muncul dan berkembang dalam masyarakat kita. Di satu pihak hal ini dapat dipandang sebagai memperkaya keragaman kelompok keagamaan Islam dalam masyarakat kita, di lain pihak juga dapat dipandang sebagai faktor yang mendorong perlombaan, (kita secara positif menyambut ini dengan kata ”berlomba”) bukan dengan kata ”bersaing”, karena kita memberi penghargaan, kita apresiasi kehadiran macam-macam organisasi atau kelompok tersebut sebagai sesuatu yang akan memberi manfaat bukan saja bagi masyarakat Islam, melainkan juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhannya. Dalam bahasa al-Qur’an hal demikian disebut *fastabiqul khairat*, sesuatu yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, yaitu berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dan mencapai kebaikan. Sementara itu, dari sisi sosiologis, kita juga dapat melihat kehadiran kelompok atau organisasi-organisasi keagamaan baru itu dari segi peran-peran yang dimainkan oleh masing-masing kelompok. Mendirikan organisasi, biasanya, selain digunakan untuk menciptakan dan menegaskan adanya identitas tertentu, juga sebagai alat untuk mengisi peran sosial yang dipandang belum dilakukan oleh organisasi ataupun kelompok yang sudah ada. Bisa juga untuk memperkuat peran yang sudah dimainkan oleh kelompok lain. Dalam konteks era

reformasi seperti sekarang ini, dimana menjadi begitu banyak organisasi, atau kelompok dan gerakan keagamaan Islam, maka membincang ulang peran-peran yang dimainkan oleh organisasi keagamaan Islam itu, secara keilmuan, perlu dilakukan, guna mengidentifikasi faham-faham atau varian-varian keagamaan, seperti yang menjadi subjek kajian dalam program kerja sama yang sedang kita jalankan

Kiranya saya tidak ingin berpanjang kalam dalam sambutan ini. Apa yang penting pada kesempatan ini adalah menyampaikan terimakasih kepada JSPS, kepada pimpinan Research Institute of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, dan Direktur Pusat Kajian Islam dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atas kesediaan bekerja sama mensukseskan seminar ini dan program-program pengembangan ilmu pengetahuan lainnya. Terimakasih juga kepada para pemakalah, dan kepada rekan Bachtiar Effendy atas kesediaan memberikan pidato kunci dalam seminar ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja untuk menyiapkan seminar hari ini.

Akhirnya dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrohim*, seminar sehari Membincang Ulang Peran Sosial-politik Organisasi Kemasyarakatan Islam di Era Reformasi, secara resmi saya buka.

Wa billahit taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr Wb

≡≡≡ **MENCERMATI PERAN ORGANISASI** ≡≡≡
KEAGAMAAN ISLAM DI ERA REFORMASI

Prof. Dr. Bachtiar Effendy

Yth. Prof. Taufik Abdullah;

Yth. Dr. Yekti, salah satu rekan lama;

Yth. Dr. Hisyam;

Dan hadirin sekalian.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pada pagi ini, saya didaulat untuk memberikan *keynote speech* tentang *Peran Organisasi Keagamaan Islam di Era Reformasi*. Saya akan mencoba memberikan ulasan tentang hal ini. Menurut saya, saat ini peran lembaga sosial keagamaan itu tidak terlalu penting. Berbeda dengan masa Orde Baru (Orba), NU dan Muhammadiyah saat itu justru sangat kreatif karena adanya berbagai tekanan untuk tidak memperbincangkan politik yang kontra dengan Orba. Oleh karena itu, peran lembaga sosial keagamaan jauh lebih aktif pada masa Orba dibanding dengan era Reformasi.

Pada era Reformasi ini, terdapat semacam demoralisasi yang menjangkiti para pemimpin ormas keagamaan. Selain itu, ormasnya sendiri tidak terlalu dianggap. Sebagai contoh, dari sisi fatwa, ormas Islam di era Reformasi ini mulai tidak didengar. Contoh lain, dalam percaturan politik nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk kabinet tanpa menyertakan Nahdlatul Ulama (NU) maupun

Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa di mata SBY, kedua ormas tersebut sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, ia tidak melibatkan ormas dan hanya melibatkan beberapa anggota dari ormas secara individu, bukan kelembagaan. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan masa Soeharto yang sangat memperhatikan ormas. Bahkan, Departemen Agama (Depag) pada masa itu sangat identik dengan Muhammadiyah.

Survei-survei menunjukkan mulai menurunnya peran sosial keagamaan politik dari organisasi sosial keagamaan. Fenomena ini jelas bertentangan dengan kiprah ormas pada masa terbentuknya. Ormas-ormas yang berkembang dari semangat keagamaan, antara lain Muhammadiyah dengan semangat Islam dan kemajuan serta NU dengan motivasi untuk membentengi paham-paham keagamaan yang sudah mentradisi dari gerusan modernisme. Pada masa itu dapat dilihat betapa orang Muhammadiyah mendorong perkembangan Sarekat Islam (SI). Masyumi pun saat itu sangat aktif dalam memobilisasi massa untuk melawan penjajahan. Di dalam suasana parpol yang belum melembaga, peran tiap ormas Islam sangat jelas. Ketika parpol Islam baru satu, seluruh ormas pun dalam kegiatan politiknya mendukung parpol tersebut. Contohnya adalah ketika Masyumi menjadi satu-satunya parpol Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, NU dan Muhammadiyah pun melebur di dalamnya.

Peran politik ormas Islam sebenarnya mulai berkurang pada masa Orba yang memang tidak mengizinkan kelahiran banyak parpol. Pada masa itu, ormas pun dilarang berpolitik. Kendati saya tidak mempunyai bukti empirik, pada masa Orba ormas lebih banyak terjun pada kegiatan sosial keagamaan. Sekolah, rumah sakit (RS), dan sebagainya, banyak dibangun pada masa ini. Jadi, dapat dipastikan bahwa pada masa ini

banyak ormas aktif. Ketika ormas tidak dapat melakukan kegiatan politik praktis, dukungan terhadap parpol Islam juga sangat kental. Dua ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah, memang banyak membantu masyarakat, mulai dari membangun sekolah hingga RS. Kedua ormas jelas menjalankan fungsi *complementing* dan *suplementing* dalam masyarakat. Ormas juga melakukan fungsi *counterbalancing the state* karena pada masa itu negara menjadi sangat menghegemoni.

Di era Reformasi, NU dan Muhammadiyah tidak lagi memainkan fungsi sosial keagamaannya, karena tersedot oleh kegiatan politik. Pada era ini, semua kegiatan sosial dari ormas Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), maupun Jaringan Islam Liberal (JIL), juga lebih tersedot pada permasalahan politik. Kini, ormas-ormas Islam ini memiliki semangat politik yang sangat kental. Ormas Islam bahkan menjadi alat politik dari orang-orang nonpolitik. Sebagai contoh adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan kreasi Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah.

Mulai dari awal Reformasi, semua ormas Islam tersedot dalam kegiatan politik. Pasca kejatuhan Soeharto, di Indonesia sebanyak 181 parpol lahir dan 46 di antaranya berbasis Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Jabal Rahmah. Hal ini menunjukkan magnet dari Reformasi yang hampir menyedot semua orang, termasuk anggota-anggota ormas Islam. Bahkan, di tahun 2000, jumlah parpol meningkat hingga 300 parpol. Pada kondisi seperti ini, peran sosial keagamaan ormas Islam jelas tidak ada lagi. Hal ini bahkan berlangsung hingga kini. Tidak ada lagi peran sosial keagamaan NU dan Muhammadiyah yang nonpolitik yang sangat berjaya di era 80-an. Apa ada universitas yang dibangun NU di masa Reformasi?

Muhammadiyah pun hanya melanjutkan kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Terdapat semacam demoralisasi yang menjangkiti manusia-manusia dalam ormas. Tidak ada lagi ikatan antara kyai-santri, pun ketua-anggota. Hal ini sudah terlihat dari hasil survei pemilu, baik tahun 2004 maupun tahun 2009. Hampir tidak ada santri maupun anggota-anggota organisasi yang mengikuti fatwa-fatwa politik dari kyai maupun pemimpin yang ada di sebuah ormas Islam. Pada awalnya, memang banyak sekali yang mendukung PAN dan PKB pada pemilu 1999, tetapi hal ini merosot tajam pada pemilu-pemilu berikutnya, terlebih pada pemilu 2009. Terdapat pergeseran dalam cara berpikir masyarakat. Belakangan, masyarakat dapat menjadi lebih pragmatis. Kini, pemilih lebih “memilih” karena uang, bukan karena ideologi. Terlebih tiadanya keteladanan kepada kyai maupun pemimpin parpol yang masih berafiliasi dengan ormas Islam. Parahnya, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beranggapan bahwa mereka tidak perlu lagi untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat karena rakyat telah dibayar pada masa pemilu. Oleh karena itu, kini mereka justru harus memperjuangkan modal yang sudah dikeluarkan untuk membayar rakyat pada masa pemilu yang telah lalu.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa hubungan kental Jusuf Kalla (JK) dengan Ketua Umum NU maupun Muhammadiyah tidak berpengaruh terhadap suara yang diperoleh JK dalam pemilu. Faktanya, publik tetap memberikan suara untuk (SBY). Publik berpatokan pada politik praktis, bukan pada politik kenegaraan, sehingga ada demoralisasi dalam pengertian politik yang demikian.

Kini, masyarakat tidak lagi memiliki panutan dari ormas Islam. Jika ingin mendapatkan nasihat sosial kemasyarakatan,

saya sendiri lebih memilih berdiskusi dengan Syafi'i Ma'arif, bukan dengan Amien Rais ataupun Din Syamsuddin.

Sepuluh tahun terakhir, NU dan Muhammadiyah benar-benar mengalami kehancuran. Kalau kita memandang perlu adanya peran sosial keagamaan dari ormas-ormas Islam, inilah saatnya. Tapi, bagaimana kita melakukannya? Kalau kita tidak serius, hal ini tentunya akan mengerikan. Bayangkan ketika agama sudah tidak fungsional, ketika tidak ada lagi ormas Islam, seperti yang lahir pada awal abad XX dan mencapai kejayaan pada tahun 80-an, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Hal ini menuntut riset yang mendalam untuk menjawabnya.

Menurut saya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada NU dan Muhammadiyah. Keduanya sebaiknya berfokus pada bidang sosial keagamaan, dengan ciri khas garapan yang selama ini sudah mereka lakukan, seperti sekolah, pesantren, RS, dan lain-lain. Keduanya pun boleh berpolitik, tetapi politiknya harus politik kenegaraan dan bukan politik praktis. Hal-hal tersebut di atas merupakan *point of departure* yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa dua ormas tersebut independen. Mereka mampu memberi dan bukannya meminta pada negara. Terlebih, kedua ormas tersebut lebih tua dibanding dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia.

DISKUSI

Komentar dan Pertanyaan Peserta:

- (1) Perkembangan ormas Islam tampaknya memang dipengaruhi akselerasi atau loncatan politik yang terjadi di Indonesia. Paham-paham keagamaan Islam di Indonesia tampaknya tidak berubah, melainkan berkembang dengan

adanya penggunaan simbol maupun label ormas-ormas Islam untuk membuka ruang-ruang baru, khususnya ruang berpolitik.

- (2) Pernyataan pembicara yang menyebutkan bahwa peran politik NU dan Muhammadiyah lebih aktif pada masa Orba daripada era Reformasi memang harus diwaspadai. Terlebih, label-label dari kedua ormas tersebut masih kerap digunakan. Sebenarnya, apa yang menyebabkan ormas Islam tidak lagi memiliki gaung di era Reformasi ini?
- (3) Ormas Islam dalam perkembangannya mulai mengalami bias. Kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok cenderung diutamakan. Krisis kepemimpinan di dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah, sepertinya juga terabaikan. Lantas, apa yg seharusnya dikerjakan dua ormas tersebut?
- (4) Pada masa ini, masyarakat cenderung lebih memilih politik ketokohan dibanding dengan politik kekuasaan (*how to access power*). Hal ini dapat dilihat dari Amien Rais dan juga Din Sjamsuddin. Pada intinya, bukan hanya parpol yang didukung ormas Islam yang mengalami penurunan suara, melainkan juga parpol berbasis Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa yang dapat disimpulkan dari fenomena ini?
- (5) Bagaimana sebenarnya kekhususan dari tiap ormas, khususnya NU dan Muhammadiyah, dalam menarik masyarakat?

Tanggapan Pembicara:

Kedua ormas, baik NU maupun Muhammadiyah sebenarnya sudah memiliki banyak program. Muhammadiyah misalnya, memiliki pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti Bank

Perkreditan Rakyat (BPR), tetapi program tersebut kurang dapat menarik masyarakat. Saat ini, program-program yang diluncurkan negara, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT), jauh lebih menarik bagi masyarakat. Pada awalnya, kedua organisasi tersebut memang tidak dirancang untuk mencari pendapatan. Keduanya hanya melakukan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Akibatnya, keduanya saat ini sangat sulit untuk berhadapan dengan magnet yang dimiliki negara.

Diversifikasi sebenarnya justru terjadi pada masa Orba, bukan pada era Reformasi. Sebagai contoh, NU keluar dari PPP. Magnet yang dimiliki negara ini sebenarnya dijadikan alat untuk mobilisasi vertikal. Pada masa Orba, Soeharto sengaja merancang bahwa posisi wakil presiden (wapres) hanya dapat diduduki tentara. Saat ini fenomenanya sangat berbeda. Untuk menduduki posisi politik, seseorang maupun kelompok memang membutuhkan parpol sebagai kendaraannya.

Saya meragukan bahwa parpol agama tumbuh karena basis agamanya. Parpol-parpol tersebut sebenarnya tidak laku karena tidak mempunyai program yang jelas. Hal ini tidak hanya terjadi pada parpol yang tampaknya "berbasis Islam," tetapi juga pada Demokrat. Hanya saja, Demokrat memiliki pemimpin yang populer dan sangat ditokohkan, dalam hal ini SBY. Apakah PKB, PAN, PPP suaranya rontok karena berbasis Islam, atau karena mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat dijual? Kita lihat saja ke depan, apakah Demokrat masih laku tanpa SBY ataukah PKB tanpa Gus Dur?

Kita umumnya masih selalu berorientasi pada posisi. Amien Rais jadi seperti ini karena dirinya sendiri atau karena dia tidak punya posisi? Apakah karena dia mementingkan

dirinya sendiri? Saya rasa tidak. Kalau dia masih mempunyai posisi, mungkin ia masih maju dengan pemikiran-pemikirannya.

Dalam politik memang terdapat *micro and macro incentive*. Pada akhirnya, yang dipilih tentunya *micro incentive* yang memberikan keuntungan pribadi/ kelompok. Hal ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh DPR masa ini. Hal yang sama juga berlaku di ormas sosial keagamaan.

Saat ini, magnet politik sangat kuat. Semua orang asal memiliki uang, pasti ingin terjun ke politik. Oleh karena itu, harus dibangun *political detachment*; politik bukan satu-satunya alat untuk mobilitas vertikal maupun horizontal. Yang patut diwaspadai adalah banyaknya pemberi dana yang ujung-ujungnya mengarahkan semua organisasi dan pengikutnya untuk berpolitik.

Komentar dan Pertanyaan Peserta:

- (1) Parpol Islam tidak laku tidak sepenuhnya benar. Perilaku politik para aktor politik saja yang berubah. Dulu, ulama juga berpolitik, tetapi bermartabat, contohnya Natsir. Sekarang, ulama itu terlalu suka uang, sehingga masyarakat semakin muak dengan elit NU maupun Muhammadiyah. Parpol Islam dianggap pudar juga tidak sepenuhnya benar. Untuk mengukur sebuah parpol itu ideologis atau tidak seharusnya diukur suasananya. Kalau pemilu 2009 kemarin, suasananya cenderung pragmatis daripada ideologis;
- (2) Hari ini dibincangkan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah. Fenomena menunjukkan adanya ormas-ormas Islam yang baru muncul, seperti HTI, FPI, dan sebagainya. Bagaimana perbandingan yang dapat ditarik

dari ormas lama dan baru tersebut? Ke depan, fenomena ini mengarah kemana?

- (3) NU dan Muhammadiyah sepertinya memang tidak dianggap lagi. Apakah stagnasi ini tidak disebabkan oleh masalah internal sendiri, jadi bukan semata-mata karena politik? Seandainya dua ormas tersebut sulit berkembang, lantas ormas seperti apa yang dapat diharapkan? Bagaimana dengan pesantren Gontor yang bukan NU dan bukan Muhammadiyah? Apa lembaga pendidikan semacam ini dapat diharapkan?
- (4) Selain politik uang, ormas Islam sepertinya memang tidak melakukan reformasi diri, sehingga kurang siap menghadapi tantangan-tantangan baru. Dua ormas Islam besar di Indonesia memang banyak diharapkan, lantas bagaimana ke depannya?

Tanggapan Pembicara:

Ada sesuatu yang hilang, baik dari NU maupun Muhammadiyah, dimana sesuatu yang hilang tersebut dulunya merupakan usaha diversifikasi. Segala yang hilang tersebut ditarik ke parpol. Oleh karena itu, harus ada semacam *engagement*, tidak sekedar parpol. Untuk mengembalikan wacana tandingan (*counter discourse*) memang perlu waktu. Optimisme baru dapat dibangun ketika semua itu ada. Muhammadiyah memiliki *trade mark* dengan sekolah dan RS. Namun demikian, apakah selama dua abad Muhammadiyah hanya dapat melakukan kegiatan tersebut, tanpa inovasi? Kenapa yang dikategorikan *the Rise* hanya Brazil, Rusia, India, dan Cina? Hal inilah yang harus digarap NU dan Muhammadiyah. Tidak seharusnya mereka semakin kacau balau dengan fatwa-fatwa haramnya.

Dulu, karena dilarang berpolitik, maka energi banyak dipakai untuk kegiatan sosial keagamaan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang, tiap orang dapat langsung masuk politik, sehingga ormas-ormas banyak yang ditinggalkan. Bahkan, saat ini terdapat usaha-usaha untuk merekrut orang-orang kreatif untuk masuk parpol. Banyak orang kreatif yang diundang ke Cikeas. Fenomena Demokrat saat ini sebenarnya sama dengan yang dialami PDIP pada tahun 1999.

Ormas-ormas Islam yang baru bermunculan belum terlembaga dengan baik sehingga sulit diharapkan. Untuk saat ini, baru HTI yang lumayan terdengar. Sayangnya, ormas Islam ini hanya mengutamakan khilawah sehingga masih sangat sulit berkembang. Karena belum terlembaga, ormas-ormas baru tersebut sangat sulit untuk diperbandingkan dengan NU maupun Muhammadiyah. Ormas Islam Baru sepertinya baru bergerak di tataran sedikit *intellectual change*.

Sesi I

CIVIL SOCIETY ISLAM DAN MASALAH DEMOKRATISASI

A. Dr. Hendro Prasetyo

CIVIL SOCIETY DAN DEMOKRASI

Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyoroti permasalahan *civil society* ini dari sisi yang lain, dengan tanpa mengurangi pesimisme terhadap Muhammadiyah dan NU yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Bachtiar Effendy, khususnya terkait dengan demokratisasi di Indonesia.

Sebenarnya saya heran mengapa konsep *civil society* ini mengemuka kembali. Konsep ini sangat laris manis untuk diperbincangkan pada pertengahan hingga akhir tahun 90-an. Menurut saya, hal ini menarik karena dapat menjadi evaluasi bagi kita bersama terhadap apa yang dulu oleh kebanyakan orang sangat diharapkan. Kini, kita dapat melihat apakah kelompok-kelompok yang termasuk dalam *civil society* benar-benar mendorong demokratisasi atau tidak. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Bachtiar Effendy tentang pesimisnya terhadap dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan *civil society* di Indonesia mengalami pasang surut.

Ketika memperbincangkan *civil society*, seringkali kita terjebak pada aspek normatif. Keyakinan yang utama adalah *civil society* ini merupakan ciri utama dari masyarakat

demokrasi liberal. Di mana pun, demokrasi yang mapan ditandai oleh *civil society* yang kuat. Pertanyaannya adalah apakah ciri-ciri ini dapat dipenuhi dunia Islam dan dunia berkembang? Beberapa tesis menyatakan bahwa *civil society* tidak ada dalam negara yang demokrasinya belum matang. Tesis lain menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Oleh karena itu, tidak mungkin muncul *civil society* dalam masyarakat Islam. Ini merupakan salah satu tesis Ernest Gelner yang pesimis terhadap munculnya *civil society* dalam masyarakat Islam. Pertanyaannya, apakah di Indonesia ada yang disebut *civil society*? Kalaupun ada, apakah mereka berkontribusi terhadap demokrasi?

Berbagai literatur menunjukkan adanya kebingungan terhadap konsep *civil society* ini. Sebagian mengatakan *civil society* sebagai organisasi atau asosiasi yang dibentuk secara sukarela. Sebagian yang lain menyatakan bahwa ciri utama dari *civil society* adalah adanya ruang di antara negara dan keluarga. Dalam konteks ini perlu diperhatikan bahwa di dalamnya tidak termasuk organisasi-organisasi maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki akses ekonomi. Definisi-definisi *civil society* ini masih sangat banyak, tetapi sangat sulit untuk ditemukan definisi yang paling tepat. Kondisi negara Indonesia memang belum mapan sehingga sulit ditemukan asosiasi-asosiasi maupun organisasi-organisasi yang independen dari kekuasaan negara, khususnya pada masa Orba. Oleh karena itu, *civil society* ideal seperti yang telah diperbincangkan masih sangat sulit untuk dijumpai dalam konteks Indonesia. Harapan terhadap *civil society* selalu didengungkan karena diyakini dapat mengatasi berbagai masalah, seperti mengatasi alienasi individu, mengurangi beban negara, menjembatani hubungan negara dan warga. Kondisi ideal ini memang menuntut

prasyarat-prasyarat infrastruktur yang tidak mudah untuk disediakan oleh negara yang memang tidak memiliki alur sejarah demokrasi ini. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pertama-tama harus ada pemisahan yang jelas antara negara dan warga. Kewargaan juga harus kuat sehingga semua warga memiliki posisi yang sama dan kuat di hadapan hukum. Lebih dari itu, masyarakat juga harus memiliki kesepakatan bahwa negara itu sah (*legitimate*).

Kendati demikian, apakah dapat dikatakan bahwa tanpa semua hal di atas tidak ada demokrasi? Kenyataannya, Indonesia sekarang mengalami demokratisasi. Untuk itu, kita dapat memposisikan bahwa *civil society* merupakan penjelas dari demokratisasi. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak terjebak dalam pandangan normatif yang meyakini bahwa *civil society* merupakan syarat mutlak bagi demokratisasi. Padahal, fakta sebaliknya juga dapat terjadi. Demokratisasi ternyata mampu memicu tumbuhnya *civil society* yang kuat. Dalam konteks Indonesia, terjadi perubahan di level negara dengan adanya demokratisasi. Perubahan di level negara inilah yang kemudian memicu kemunculan *civil society*. Oleh karena itu, kita perlu mempertanyakan kembali apakah *civil society* harus dibangun untuk mewujudkan demokrasi atau justru demokratisasi mampu memberikan ruang yang lebih terbuka untuk tumbuh dan berkembangnya *civil society*.

Ketika memperbincangkan demokrasi, maka pertanyaan yang paling penting adalah, siapa yang paling berkontribusi dalam demokratisasi di Indonesia, khususnya dari kalangan Islam? Kondisi Orba yang memperlihatkan sebuah negara yang bersifat *corporatist state* di mana ruang munculnya asosiasi atau organisasi yang otonom dan independen sangat sulit, maka dapat dilihat bahwa demokratisasi tidak harus muncul dalam

konteks normatif yang demikian. Kontrol terhadap pemerintah dapat jadi muncul dari dalam sendiri. Sebagai contoh adalah gerakan perempuan. Gerakan perempuan pada masa Orba justru dimotori dari dalam yang biasa disebut feminis tapi teknokrat. Merekalah yang bertanggung jawab dengan kemunculan Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW), pengadopsian konvensi hak perempuan, maupun penggalangan demonstrasi demi meloloskan undang-undang (UU) tentang perkawinan. Gerakan semacam ini pada masa itu justru muncul dari negara. Hal yang sama juga terjadi pada kemunculan figur-figur di kalangan Islam.

Hal yang berbeda terjadi di era Reformasi ini. Kini, tampaknya tidak muncul organisasi-organisasi yang benar-benar *indigenous*. Banyak ahli yang mengatakan bahwa akar *civil society* kebanyakan berasal dari organisasi-organisasi lokal. Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa dalam demokratisasi ini terdapat dua arus, yaitu arus internasional yang cenderung lebih kuat dan arus dalam negeri yang banyak dimotori oleh mahasiswa. Arus internasional inilah yang seringkali luput dari analisis kita tentang demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia. Gerakan perempuan, gerakan buruh, dan *nongovernment organization* (NGO) adalah contoh arus internasional yang mulai marak pasca keruntuhan komunisme.

Gerakan perempuan di Indonesia sendiri baru menjadi *booming* pada pertengahan tahun 90-an ketika organisasinya sudah terlembaga dengan baik. Gerakan-gerakan ini dicontohkan oleh Kalyana Mitra, Rifka Annisa, dan sebagainya. Gerakan ini merupakan bagian dari arus internasional yang sedang berkembang sehingga tema-temanya banyak yang menggunakan tema-tema internasional, seperti hak perempuan dan hak reproduksi yang saat itu masih asing sekali di telinga

masyarakat lokal. Tetapi, gerakan ini menjadi bagian dari masyarakat internasional, maka hal ini menguat. Arus ini juga masuk dalam kalangan Islam tradisional. Di dalam NU sendiri contohnya, terdapat Fatayat dan PKM. Hal ini menunjukkan bahwa kendati masih menggunakan identitas NU, asosiasi-asosiasi ini menunjukkan adanya arus demokratisasi internasional.

Saya menyebut organisasi-organisasi ini bertumpu pada ideologi yang sedang berkembang di tingkat internasional, yang disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Mayoritas gerakan mengadopsi perspektif tentang hak, yang berbicara tentang hak-hak sipil, kebebasan hidup, kebebasan beragama, dan hak-hak lain yang menjadi hak dasar dalam kehidupan manusia. Kemunculan NGO Islam menjadi bagian dari poros ini. Kemunculan gerakan antidemokrasi juga terjadi di tingkat internasional. Keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi contoh arus antidemokrasi di tingkat internasional. Kendati organisasi-organisasi semacam ini hendak dinegasikan oleh negara, bagaimanapun juga harus diakui bahwa mereka juga berperan dalam pembentukan awal demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan yang memerlukan jawaban adalah apakah ormas-ormas Islam tradisional ini masih dapat diharapkan untuk berperan aktif? Permasalahan mendasarnya adalah terdapat kesenjangan antar organisasi.

Civil society yang banyak berkembang saat ini lebih banyak yang mengarah pada konsep yang diperbincangkan tadi. Sementara itu, keberadaan ormas Islam yang *well established*, seperti NU dan Muhammadiyah dianggap sangat konservatif. Hal ini dicontohkan oleh Fatayat dan Muslimat yang ada di NU. Sementara di Muhammadiyah hal ini diperlihatkan oleh Naisiyatul Aisyiyah dan Aisyiyah. Kalau dilihat, Fatayat dan

Naisiyatul Aisyah merupakan bagian dari arus internasional seperti yang sudah disebutkan. Arus-arus internasional yang masuk pada berbagai organisasi inilah yang harus selalu diperhatikan. Lantas, apakah kita masih bisa bertumpu pada konsepsi *civil society* yang demikian bagi perkembangan demokrasi? Organisasi keagamaan Islam sebenarnya juga tidak sepenuhnya menjadi pendorong demokratisasi di Indonesia. Jika kita masih berharap pada dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah, maka ada dua tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu

- (1) Kemunculan arus internasional yang mengejawantah dalam NGO-NGO yang berafiliasi pada ormas Islam terbesar tersebut, seperti LKiS yang berafiliasi pada NU;
- (2) Kemunculan gerakan perlawanan terhadap demokrasi yang kemudian lebih mengutamakan persaudaraan dan keagamaan, seperti HTI.

Saat ini memang terjadi politisasi yang sangat besar sehingga NU dan Muhammadiyah sulit berkembang. Diversifikasi terjadi pada tubuh NU dan Muhammadiyah yang mengejawantah dalam organisasi-organisasi di bawahnya yang berkiblat pada arus internasional. Kalau kita memperbincangkan demokrasi maupun demokratisasi dalam kaitannya dengan organisasi Islam, NU dan Muhammadiyah begitu juga dengan ormas-ormas Islam lain, sebenarnya semuanya masih menjalankan peran-peran *civil society*. Dukungan terhadap demokrasi sendiri masih stabil dan sangat tinggi, sehingga menjadi dukungan yang besar dan optimisme bagi perkembangan *civil society* di Indonesia.

B. Drs. Anas Saidi, MA

CIVIL SOCIETY ISLAM DAN MASALAH DEMOKRATISASI DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN

1. Pendahuluan

Pertanyaan apakah sesungguhnya Islam itu sejalan dengan demokrasi, rupanya telah menjadi sebuah wacana yang tidak henti-hentinya disuguhkan sebagai tanda *keraguan* sekaligus *harapan*. Daftar fakta sosiologis yang memperlihatkan minimnya negara-negara Muslim yang menganut sistem demokrasi, seringkali menjadi alasan utama: mengapa keraguan itu layak dikembangkan sebagai hipotesis. Sebaliknya, proyek demokrasi yang kini sedang dijalankan negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia, yang secara formal telah memperlihatkan “kesuksesan” dalam menggelar upacara demokrasi, setidaknya dalam pemenuhan prosedurnya secara aman dan damai, telah menunda keraguan itu menjadi harapan baru yang lebih menjanjikan.

Meskipun begitu, meletakkan variable *civil society* (masyarakat sipil) sebagai landasan utama atas kemapanan demokrasi, agaknya membutuhkan sejumlah prasyarat ikutan yang perlu dipenuhi. Untuk mengevaluasi peran masyarakat sipil di Indonesia, khususnya terhadap organisasi keagamaan, rupanya masih membutuhkan sejumlah pertanyaan awal: guna memastikan apakah menempatkan masyarakat sipil sebagai unit analisa perkembangan demokrasi di Indonesia masih relevan. Kesulitan itu setidaknya dibatasi oleh latarbelakang historis *civil society* di barat yang sejak awal kelahirannya memiliki ruang sosial dan ekologi politik yang berbeda. Dan, mengalami booming setelah ambruknya communism Uni Soviet, sebagai

cerminan lelehnya peran negara yang nyaris tidak dapat diselamatkan karena tiadanya *civil society* (Kaviraj, 2001). Sedangkan beberapa kesulitan untuk meletakkan determinasi *civil society* sebagai pendorong demokrasi itu antara lain adalah:

Pertama, betapapun keberadaan masyarakat sipil ikut menjadi penjelasan utama atas keberadaan dan kelangsungan demokrasi, namun ia hanyalah salah satu syarat dari sekian syarat yang dibutuhkan. Untuk membangun konsolidasi demokrasi yang stabil dan mapan, masih dibutuhkan sejumlah prasyarat lain.

Kedua, analisis atas pentingnya peran *civil society*, dalam kontek Barat, posisi negara selalu ditempatkan sebagai pemegang monopoli kekuasaan yang serba dihadap-hadapkan dengan masyarakat sipil yang tersubordinasi. Sehingga –dalam konteks Indonesia saat ini—layakkah kita menanyakan kembali peran masyarakat sipil ditengah-tengah demokrasi sudah tidak lagi sedang diperebutkan, melainkan sedang “dijalankan” dalam ruang sosial yang relatif terbuka.

Betapapun wajah demokrasi yang dipertontonkan baru sebatas penguatan procedural dengan corak yang serba kontraktual yang subtansinya masih dinodai oleh berbagai distorsi, secara de facto, masyarakat sipil di Indonesia sedang tidak ditugaskan untuk *merebut* demokrasi dari tangan negara melainkan *mengisi* konsolidasi demokrasi yang lebih berkeadaban.

Ketiga, konsep *civil society* pada dasarnya hadir dalam kontek tradisi masyarakat sekuler yang intinya mensyaratkan pemisahan antara negara dan agama sebagai prasyarat hadirnya demokrasi. Disini agama atau lebih tepatnya organisasi

keagamaan tidak dihitung sebagai pelaku sosial yang determinan. Di Indonesia yang menempatkan agama dan negara dalam posisi yang saling mengisi dalam terma “bukan sebagai negara agama dan bukan sebagai negara sekuler”, jelas menempatkan posisi organisasi keagamaan memiliki tugas yang lebih rumit. Tugas masyarakat sipil Islam, di luar berkaitan dengan memelihara kemandiriannya sendiri, juga adanya keharusan untuk menjaga keseimbangan konsensus nasional itu.

Tulisan pendek ini jelas tidak memiliki kapasitas untuk menuntaskan sejumlah kesulitan di atas, melainkan sekedar ingin merefleksikan celah-celah manakah yang dapat dilakukan organisasi keagamaan Islam dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Nampaknya ada benarnya, walaupun ada pembinaan yang baik terhadap akar-akar pluralism di Indonesia, dan terdapat keyakinan yang dalam tentang demokrasi”, keberadaan masyarakat sipil saja tidak mencukupi untuk menghidupkan demokrasi, tanpa mensipilkan negara (Hefner, 2000)

2. Islam dan Demokrasi: Afinitas yang Terbengkalai

Dalam tradisi teori modernisasi yang menempatkan *civic culture* sebagai pendekatan utamanya, cenderung melihat agama dalam dua belah keping mata uang. Sebagai produsen nilai, sistem simbolik dan pedoman tindakan, agama dapat hadir sebagai penghambat dan/atau pendorong demokrasi. Keduanya sangat tergantung seberapa jauh agama memiliki kewibawaan sebagai referensi kesadaran sosial yang pada gilirannya menjadi pedoman tindakan dalam menyikapi demokrasi.

Para ilmuwan sosial pada dasarnya terbagi dalam tiga kelompok dalam melihat hubungan antara agama dan politik. Kelompok pertama mengklaim bahwa agama merupakan

kekuatan konservatif yang menghambat perubahan sosial politik, yakni modernisasi politik. Kelompok kedua mengklaim bahwa signifikansi agama dalam politik merosot ketika proses modernisasi berlangsung. Kelompok ketiga percaya bahwa agama, paling tidak, secara tidak langsung, memberikan sumbangan pada proses modernisasi politik (Mujani, 2007: 7)

Dalam konteks Islam, sejumlah ilmuwan barat, seperti Huntington telah memberikan labeling yang provokatif tentang Islam dalam “clash of civilization” yang terkenal itu. Dalam kenyataannya, ramalan Huntington, cenderung mempertebal semangat negatif, yang justru menjadi lahan pembenaran kelompok radikal untuk membenarkan kebutuhan melakukan perlawanan terhadap Barat, daripada sebagai ramalan cuaca kebudayaan.

Cerita tentang inkompabilitas Islam atas demokrasi yang dipetik dari pemahaman Islam yang monolitik, misalnya, bukan sekedar mengecilkan kenyataan negara Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia yang sedang menerapkan demokrasi, tetapi juga, mengecilkan arti afinitas Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti: *al-adl* (keadilan), *al-musyawa* (musyawarah), *al-khuriah* yang inheren dalam doktrin Islam itu sendiri, menjadi terbengkalai.

Ramalan itu juga, secara tidak langsung, ikut mengobarkan kembali kebutuhan identitas tunggal, yang diilhami oleh gerakan Ichwanul Muslimin atau gerakan Salafi lainnya. Tesis Huntington secara tidak disadari juga ikut menyumbangkan terpeliharanya *stereotyping* atau pencitraan secara negatif yang merugikan kedua-belah pihak. Kegagalan memahami Islam dengan segala variasinya atau Barat dengan berbagai ragamnya, lebih melestarikan “perang wacana” yang tidak henti-hentinya memproduksi semangat permusuhan.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, menurut Huntington bahwa sintesis antara sentimen Islam dan ide negara-bangsa tidak mungkin dikompromikan. Loyalitas kaum Muslimin terhadap *ummah* begitu kuat sehingga hal itu mengalahkan solidaritas mereka terhadap negara bangsa. Efek negative konsep *ummah* inilah, yang akan membuat negara bangsa tidak stabil. Kaum muslim tidak akan berhasil mengubah kesetiaan politik mereka dari *ummah* ke negara – bangsa. Solidaritas *ummah* yang berakar kuat dalam kesadaran kaum Musliminin, menurut Huntington, tidak memungkinkan tumbuhnya loyalitas terhadap negara bangsa diantara mereka. Huntington percaya bahwa *ummah* dan negara bangsa merupakan dua hal yang saling bertentangan (Ibid., hal 17).

Rupanya, hipotesis Huntington ini lebih didasarkan pada pemahaman homogen Islam yang dianggap memiliki pandangan tunggal dalam relasinya dengan kekuasaan (“Islam addin wa daulah”) model Maududian. Padahal, sebagian besar Islam mainstream di Indonesia lebih menyetujui model Abdurroziq, tentang teori pemisahan antara agama dan negara. “Islam tidak menentukan sistem pemerintahan (negara) secara definitive. “Islam seharusnya tidak perlu diideologikan karena ideologisasi agama justru akan mempersempit wilayah kekuasaan agama, sehingga tidak lagi memberi makna universalitasnya (*shalihah likulli zaman wa makan*) (Hussien, 1998, Anas, 2004:76). Dalam konteks pemahaman seperti ini, pada dasarnya nilai-nilai sendi kehidupan bernegara: keadilan (‘adalah), persamaan (mushawah), dan demokrasi (syura), memiliki paralisis dengan nilai-nilai demokrasi. Karena itu pemahamannya terhadap Islam tidak akan mengurangi loyalitasnya terhadap nation state, yang dalam bentuknya di

Indonesia, dituangkan dalam penerimaannya terhadap Pancasila.

Elemen lain yang sering dianggap berkaitan dengan hubungan antara Islam dan demokrasi adalah tidak adanya *civil society* yang dipercaya sebagai faktor penting bagi konsolidasi demokrasi (Schmitter, 1997, seperti dikutip Mujani, 2007). Di banyak negara Muslim, khususnya di Timur Tengah, keberadaan kelas menengah sangat lemah, karenanya *civil society* yang relatif independent tidak dapat tumbuh. Dalam pandangan Gellner (1994) ketiadaan *civil society* secara significant, terletak pada karakter masyarakat itu sendiri, di mana solidaritas sosial diciptakan berdasarkan kombinasi antara solidaritas keislaman dan kesukuan. Kombinasi ini dianggap tidak mendukung tumbuhnya *civil society*.

Tetapi sekali lagi, baik pandangan Schmitter maupun Gellner, lebih didasarkan pada referensi tunggal tentang apa yang terjadi di dunia Islam, non-Indonesia. Di Indonesia kehadiran masyarakat sipil Islam merupakan pergumulan panjang yang melibatkan banyak elemen, termasuk NU dan Muhammadiyah, yang sejak kelahirannya memiliki peran aktif dalam memperjuangkan hadirnya masyarakat sipil.

Sebenarnya masih terdapat sejumlah prasyarat lain yang sering disebutkan sebagai prasyarat bagi konsolidasi demokrasi seperti, partisipasi politik, toleransi politik, civic engagement, ruang publik yang bebas dsb. Namun agaknya yang paling mendasar dan secara tidak langsung berkaitan dengan agama adalah budaya politik dan modal sosial. Tentang peran budaya dalam membangun tradisi demokrasi banyak diyakini oleh para ilmuwan pengikut tradisi Weberian, seperti Francis Fukuyama, Lowrence Horrison, Samuel Huntington, Robert Putnam,

Daniel Bell dsb, memiliki peran budaya dalam membentuk perilaku politik dan ekonomi.

Huntington (1993), berpendapat bahwa dunia terbagi dalam delapan atau sembilan peradaban besar berdasarnya langgengnya perbedaan-perbedaan budaya yang berlangsung selama berabad-abad dan konflik-konflik masa depan akan terjadi sepanjang jalur patahan budaya yang memisahkan peradaban-peradaban itu. Selepas perang dingin menurutnya, konflik politik akan terjadi di jalur pemisah budaya ini, dan bukan sepanjang garis ideologi atau ekonomi; Sementara Robert Putnam (1993) mengatakan bahwa wilayah-wilayah Italia tempat institusi demokrasi saat ini berjalan paling sukses, adalah wilayah-wilayah di mana masyarakat sipil relatif berkembang baik selama berabad-abad sebelumnya (Inglehart, 2006). Dalam studinya di 65 negara, termasuk negara-negara Muslim di Timur Tengah, Inglehart, menyatakan bahwa tradisi-tradisi keagamaan tampaknya mempunyai dampak abadi atas sistem nilai kontemporer. Tetapi agama bukan satu-satunya faktor yang membentuk wilayah-wilayah budaya. Budaya masyarakat mencerminkan seluruh warisan sejarahnya.

Sementara dalam kaitannya dengan modal sosial yang elemennya menyertakan pentingnya: trust, reciprocity, net work, solidarity dsb, banyak para ahli yang menyakini memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan demokrasi (Putnam, 1993, Uptoff, 2002, Coleman 1977, Fukuyama, 1989). Fukuyama misalnya, membahas secara mendalam tentang pentingnya peran modal sosial dalam mempromosikan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk dalam ranah keluarga. Jika masyarakat sipil pada dasarnya ada diantara keluarga dan negara, maka minsipikan negara dan mendemokrasikan keluarga melalui sosialiasi nilai-nilai agama yang toleran,

inklusif, sangatlah penting. Nampaknya dalam modal sosial inilah kita paling lemah.

3. Peran *Civil Society* di Tinjau Kembali

Satu hal yang perlu diingat kembali bahwa peran penting *civil society* bagi konsolidasi demokrasi terletak pada kapasitasnya untuk menumbuhkan sikap toleran, di mana warga negara yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda dapat bekerjasama mencapai kepentingan kolektif (Ibid., 172). Unsur toleransi dibutuhkan bukan hanya sebagai landasan bagaimana nilai-nilai demokrasi dikembangkan, tetapi juga, dalam upaya kemungkinannya merumuskan kehendak bersama.

Sementara keberadaan *civil society* sendiri membutuhkan sejumlah syarat seperti adanya: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public*), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat (Hikam, 2001: 3). Jadi disini ada unsur minimal yang harus dipenuhi: kemandirian, netral secara politik, kedap dalam godaan material sebagai syarat kemandiriannya dan adanya ruang publik yang bebas.

Mengenai ruang publik Habermas (1989) mengembangkan *argument* bahwa kelahiran demokrasi Eropa berasal dari ruang publik yang tumbuh di kalangan borjuasi.

Apa yang dimaksud sebagai ruang publik disini adalah suatu ruang di mana anggota masyarakat dapat mendiskusikan dan berdebat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak (*public interest*). Dengan melihat ruang publik ini, Habermas ingin menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, tetapi terutama pada kekuatan dan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat. Dengan ungkapan lain, demokrasi bukan sistem pemerintahan melainkan budaya politik masyarakat.

Jika penguatan demokrasi tergantung dengan budaya, maka budaya publik pada akhirnya tergantung pada lembaga-lembaga mediasi di mana warga negara mengembangkan kebiasaan berbicara bebas, partisipasi dan tolerannya, (Hefner, 2000: 35), maka peran asosiasi-asosiasi sukarela Islam ditagih memainkan peran penting adalah kehidupan publik masyarakat sipil dan etika personal.

Oleh karena tantangan kedepan bagi institusi agama Islam dalam mencari format baru yang lebih relevan, khususnya dalam kontribusi terhadap masa depan demokrasi di Indonesia: tidak hanya memberikan sosialisasi tentang adanya afinitas antara nilai-nilai universal Islam dengan demokrasi, tetapi juga, ditingkat empiris perlunya upaya untuk memberikan peragaan yang konsisten bagaimana etika publik diisi oleh nilai-nilai agama. Harus diakui bahwa selama ini krisis terbesar bangsa ini lebih pada krisis moral. Agama cenderung dihampiri sebagai pengetahuan normatif, sangat dipatuhi ritualnya tetapi diabaikan pesan subtansinya. Hampir tidak ada lagi peragaan yang memadai untuk dijadikan referensi tindakan publik, bagaimana nilai-nilai moral keagamaan itu seharusnya dijaga, termasuk dalam ormas keagamaan. Krisis yang terjadi bukan

pada tataran bagaimana seharusnya inkonsistensi itu dihindari, tetapi lebih pada rapuhnya daya tahan dalam menghadapi godaan kekuasaan yang menjanjikan banyak hak-hak istimewa. Seolah-olah kita benar-benar kehilangan orientasi atas tindakan apa saja yang menagih kejujuran moral.

Apa yang menjadi problem sekarang dalam pembaharuan Islam, bukanlah terletak pada minimnya pemikiran pembaharuan dalam menginterpretasikan Islam dalam menghadapi perubahan zaman, khususnya dalam kaitanya dengan demokrasi, tetapi lebih pada terbatasnya kesediaan dalam menerima setiap tafsir baru yang bertentangan dengan keyakinannya. Masyarakat keagamaan cenderung sangat keras dalam mengadili pemikiran yang liberal, tetapi begitu permisif terhadap kebebasan bertindak yang melampaui kaidah-kaidah Islam sendiri. Jika saja dalam Qur'an dikatakan bahwa "rosi wal-murtasi kulluhum finnar" (baik yang menyogok maupun yang disogok keduanya akan masuk neraka), selalu dibangun rasionalitas untuk membenarkan aneka kompromi yang bernuansa korupsi, money politic dan sejenisnya dengan berbagai pembenaran. Tidak ada jiwa yang militant dalam mengadili tindakan yang serba permisif ini. Sebaliknya sangat militant dalam mengadili pemikiran, termasuk dengan kekerasan.

Padahal kekerasan tidak hanya mengancam tradisi kewarganegaraan yang dibangga-bangkan Indonesia, tetapi juga tradisi yang sudah begitu menonjol dalam warisan budaya orang-orang muslim Indonesia, yaitu komitmen mereka pada impian terwujudnya sebuah bangsa multietnis dan multireligius. Perkembangan-perkembangan yang dirintis oleh kaum elite di bidang politik sering kali memporakporandakan kemajuan yang

sudah dicapai dalam sivilitas dan toleransi dalam beragama (Hefner, 2001: 69).

Jika benar bahwa kemunduran demokrasi menunjukkan bahwa prestasi demokrasi sangat tergantung pada daya topang sumberdaya budaya lokal, sehingga tidak sekedar membutuhkan pemilu dan konstitusi, maka untuk membuat keadaban demokrasi, membutuhkan kerja budaya yang panjang. Seperti yang dianalisis oleh Habermas (1989) yang menekankan bahwa kehidupan demokrasi tidak hanya tergantung pemerintah, tetapi pada sumberdaya dan kebiasaan masyarakat secara luas. Demokrasi bagaimanapun kesadaran tentang multicultural dan kebutuhan menerima pluralism sebagai landasan demokrasi harus disosialisasikan sejak dini (Hefner, 2001: 19).

Sayangnya ruang publik inilah yang paling tidak aman saat ini ketika pewacanaan yang dilakukan berkaitan dengan pembaharuan pemikiran keagamaan. Seolah-olah kita kembali pada jarum sejarah abad ke tujuh ketika monopoli tafsir agama digenggam oleh kholifah, yang mendera setiap pemikiran ulama yang berseberangan. Berbagai ancaman yang seringkali muncul bagi para penggagas pemikiran alternative dengan mudah distigmakan secara negative sebagai Islam Liberal. Padahal ruang demokrasi membutuhkan kebebasan berfikir dan kekuatan berimajinasi seluas-luasnya tanpa harus dicurigai sebagai liberalism dalam konotasi yang negatif. Minimnya perlindungan dalam pertarungan wacana, merupakan perkembangan yang paling merisaukan dan tidak produktif dalam keadaban demokrasi di Indonesia.

Nampaknya ada benarnya, bahwa dalam semua tradisi modern, pembaharuan agama mensyaratkan keseimbangan yang sulit antara masyarakat yang berubah dan gagasan-gagasan yang mengorientasikannya (Hefner, 2001: 35). Oleh karena itu

jika benar bahwa kualitas Islam Indonesia adalah pluralism budaya yang luar biasa, maka pemeliharaan atas kelangsungan kekayaan itu harus menjadi tugas bersama. Dan, masyarakat sipil Islam mestinya dapat memainkan peran di wilayah ini.

Meskipun begitu satu hal yang harus dipahami untuk melihat seberapa jauh *civil society* memiliki kontribusi terhadap konsolidasi demokrasi, masih harus dibaca sebagai entitas yang memiliki kepentingannya sendiri. Untuk mengukur seberapa jauh *civil society* memegang kunci penjelasan dalam konsolidasi demokrasi, bukan hanya mempertanyakan apakah mereka kepedulian atau tidak, tetapi juga, yang perlu dipastikan sejauhmana obsesitas kepentingan itu tidak melampaui *public interest*. Media masa, misalnya, yang selama ini dipuji-puji sebagai lokomotif pendorong demokrasi perlu mendapatkan pertanyaan kritis: apakah komitmen ini merupakan bagian dari strategi dagang yang memanipulasi berita sebagai komoditi; ataukah merupakan bagian dari penyebaran sebuah komitmen untuk membangun kesadaran sosial tentang arti pentingnya demokrasi. Apakah mereka relatif mampu mengekang dominasi modal dalam mewarnai pemberitaan yang disajikan, dan bebas dari dominasi modal dibalik layar tetaplah menjadi filter utama dalam menguji komitmen itu.

4. Menagih Peran NU dan Muhammadiyah

Jika peran itu ingin ditanyakan pada organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, maka pertama-tama yang perlu ditanyakan apakah keduanya memiliki prasyarat minimal sebagai masyarakat sipil atau tidak. Di luar sebagai masyarakat sipil keagamaan harus memperagakan contoh baik dalam tata kelola moral, juga dituntut untuk selalu mengambil jarak dengan kekuasaan, yang besar kemungkinan

menagih peran legitimasi, ormas keagamaan juga harus selalu menyediakan amunisi untuk mengobarkan semangat “amar ma’ruf nahi munkar” tanpa merasa takut kehilangan privilese apapun yang mungkin merasa perlu dipelihara.

Tidak ada agenda yang perlu ditetapkan yang mendahului apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi negara. Menjadi oposisi atau sebaliknya sebagai penjaga status-quo bukanlah hasil kalkulasi akhir yang sekedar ditetapkan dari hitungan transaksi yang didasarkan pada keuntungan-kerugian politik yang akan menyimpannya. Pilihan tindakannya harus didasarkan pada “imperative categories” sebagai bagian dari tugas kenabiannya. *Performance* seperti ini penting dipertontonkan secara terus-menerus ditengah-tengah masyarakat mengalami krisis kepercayaan.

Harus diakui Gus Dur dan Amien Rais, di masa lalu telah berhasil dalam mempertahankan eksistensi masyarakat sipil Islam, ketika berhadap-hadapan dengan rejim orba yang pada waktu itu sedang ganas-ganasnya membasmi apa saja yang berbau oposisi. Keberhasilan keduanya dalam membawakan kemandirian NU dan Muhammadiyah, memberikan teladan yang berarti bagaimana masyarakat sipil Islam harus berani mengambil risiko politik yang nyaris tidak diperlihatkan oleh political society, pada waktu itu.

Bahkan, dengan segala kekurangannya, Gus Dur sebagai presiden terpendek, juga telah berhasil mensipilkan negara. Ruang publik yang tidak seharusnya dipegang negara, seperti departemen penerangan dan departemen sosial, dibubarkan. Sayangnya kebijakan ini tidak diteruskan dan bahkan cenderung menjadi sumber sengketa tentang hak-hak masyarakat sipil.

Sebagai organisasi keagamaan mainstream yang telah mengikarkan diri janji setia pada Pancasila, UUD 1945 dan

NKRI, NU dan Muhammadiyah harus bertanggungjawab atas kelangsungan konsolidasi demokrasi yang sangat lamban dan penuh distorsi saat ini. Dua arus besar yang sedang mengepung tata kehidupan kita antara: fundamentalisme pasar yang memproduksi sikap hedonism, konsumerism dan pragmatism yang pada gilirannya telah menjadi pendorong utama lahirnya sekulerisme dan fundamentalisme agama yang menghambat pertumbuhan demokrasi, memproduksi sikap intoleransi, merupakan tantangan riil yang harus dihadapi.

Sekiranya NU sebagai bagian dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, ingin memainkan peran penting dalam layar demokrasi di Indonesia, maka latarbelakang historis kelahirannya perlu dipertegas kembali. Komite Hijaz, yang pada waktu itu, merupakan reaksi atas mengerasnya kaum Wahabiya (Bush, 2009: 34) yang memperlihatkan wataknya yang keras anti-tradisi dan gerakan *Nahdhatut Tujar* (kebangkitan pedagang) serta Khittah 1926, adalah kekuatan sejarah yang mempertegas penolakannya terhadap fanatisme agama, memprioritaskan pentingnya gerakan ekonomi dan penegasan atas pentingnya NU steril dalam permainan politik praktis.

Sayangnya hampir dalam semua pesan sejarah itu, kini, tidak terjadi reaktualisasi yang memadai. NU kurang memiliki respon sistematis dalam upaya mempertahankan pendulum corak Islam moderat dengan menempatkan tradisi sebagai energi perubahan yang dapat dijadikan referensi kultural. Demikian juga masalah pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan umat lapisan bawah, merupakan sektor yang paling terbengkalai. Godaan politik -- meskipun secara de facto selalu diingatkan atas pentingnya khittah 1926 -- masih tetap merupakan pilihan dilematis yang paling permanen.

Demikian juga Muhammadiyah yang dalam kelahirannya dijiwai oleh semangat pembaharuan dan rasionalitas sebagai instrument terdepan dalam menafsirkan doktrin agama, terlihat semakin jumut dan kehilangan koosa kata dalam menjawab tantangan zaman. Islam modernis ini terkesan cenderung bergerak “kekanan” dan lebih konservatif. Dominannya kecenderungan skriptualis telah mengabaikan semangat yang berkobar-kobar dari kalangan generasi mudanya yang mengingatkan atas pentingnya variable budaya. Sikap yang harus dikembangkan, secara internal dinamika organisasi keagamaan terbesar kedua ini mestinya memberikan ruang yang sepadan dalam setiap wacana keagamaan yang berkembang. Demikian juga sikapnya dalam “pengoreksi” pemerintah, yang sejak dini dipersiapkan, menjadi lebih mengesankan sebagai praktisi oposisional yang umumnya diperankan *political society* daripada sebagai *civil society* berbasis keagamaan.

Semestinya NU dan Muhammadiyah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan umat khususnya dalam penguatan ekonomi masyarakat bawah dan berperan aktif dalam memelihara kesetiaannya dalam Pancasila dan UUD 1945. Meskipun hal ini terasa klise dan terkesan normatif tetapi dalam arena inilah sesungguhnya kita sedang mengalami krisis legitimasi. Maka, tugas-tugas yang perlu diperankan selalu memberikan peringatan kepada negara yang cenderung mengabaikan konstitusi sebagai landasan kebijakan (condong neoliberal) dan membangun budaya demokrasi yang santun dan produktif, dengan secara tegas dan aktif dalam setiap wacana publik yang mengancam Islam inklusif yang toleran (*rahmatan lili alamin*).

Dalam konteks pemeliharaan ideologi, Muhammadiyah dan NU harus berani memberikan counter wacana atas gerakan keagamaan yang ingin mengembalikan Piagam Jakarta yang

dianggap representasi pengusungan semangat negara agama dan kelompok garis ekstrem sekuler pengusung prinsip-prinsip kebebasan maksimal yang mengabaikan eksistensi agama sebagai kehidupan publik, karena keduanya sama-sama bersifat a-historis bagi bangsa Indonesia yang telah menetapkan diri "bukan sebagai negara agama dan bukan negara sekuler".

Tekanan pada negara sekuler dengan privatisasi peran agamanya menemukan tantangan yang serius ketika gelombang globalisasi demokrasi berjalan dengan arus balik revitalisasi peran agama dalam urusan publik. Tesis *secularization as religious decline* agaknya benar-benar mengalami kebangkrutan. Dalam ungkapan Benyamin F. Intan (2007: 7), sebagaimana dikutip Yudi Latief (2008) bahwa, "Geliat agama yang merambah ruang publik, dengan meninggalkan wilayah privatnya, lalu mempertanyakan dan menggugat rezim-rezim penguasa seperti terlihat dalam kasus di Spanyol, Polandia, Brazil, dan Amerika Serikat, harus dilihat sebagai penolakan agama terhadap usaha penderdilan". Keterlibatan agama dalam urusan publik melahirkan konsep baru bernama "agama publik" yang melakukan apa yang disebut Casanova sebagai "deprivatisasi agama" (*the deprivatization of religion*) dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhinya.

5. Penutup

Pertama, sekiranya kemapanan demokrasi diyakini akan terjadi jika ada hubungan yang setara antara: negara, masyarakat dan pasar, maka tugas masyarakat sipil di Indonesia adalah menjadi mediasi bagaimana keseimbangan itu selalu dijaga. Fundamentalisme pasar yang ditandai kuatnya semangat dalam memberikan peran pasar (bebas) baik dalam kecondongan paradig (neolib) maupun ketidakmandirian

kebijakan (Washington consensus) di luar telah menyusutkan peran negara, ekologi itu dalam kenyataannya telah mempertebal polarisasi dan menyempitkan kesempatan pelapisan bawah untuk memperoleh hak-haknya, khusus dalam pendidikan tinggi sebagai sarana utama untuk mengubah mobilitas vertikalnya. Ekologi itu juga merangsang sikap hedonism yang mendorong budaya materialistic yang serba menomorsatukan kenikmatan material dan menyebabkan kekuasaan sebagai perburuan pendapatan yang pada gilirannya menjadi sumber krisis moral (korupsi). Di sini peran *civil society* Islam memiliki tugas untuk mengingatkan negara agar secara konsisten menjalankan pesan konstitusi (UUD 1945) yang menempatkan hak-hak dasar sebagai prioritas kebijakan. Sementara itu fundamentalisme agama yang memiliki respon negative terhadap Pancasila sebagai consensus ideologi bangsa, memuat kekhawatiran bukan saja dalam tujuannya (mendirikan negara agama), tetapi juga, dalam cara-cara yang ditempuh, terutama ketika tafsir agama dimutlakkan dalam cara “kekerasan”. Di luar tradisi seperti ini mengabaikan kebutuhan obyektif atas bangsa Indonesia yang secara de facto sebagai masyarakat plural dan multikultural, tradisi pemutlakan tafsir, juga, akan menghalangi terbukanya tradisi dialog sebagai landasan utama terbentuknya budaya demokrasi dan keadabannya.

Kedua, sekiranya masyarakat sipil Islam di Indonesia ingin memiliki kontribusi yang berarti dalam konsolidasi menuju keadaban demokrasi, nilai-nilai universal Islam seperti: *Al-Ikhlash* (ketulusan); *Al-‘Adalah* (Keadilan), *At-Tawassuth* (Moderasi) *At-Tasamuh* (Toleransi); *Amruhum Syura Bainahum* (*Demokrasi*), harus dijadikan sosialisasi pertama pada anak-anak bangsa, bukan dalam bentuk pewacanaan yang lepas dari peragaan, tetapi harus dipertontonkan dengan contoh

konkrit dalam pengelolaan organisasi keagamaan yang netral dalam politik praktis dan kedap dari kepentingan yang melampaui *interest public*.

Ketiga, secara keseluruhan peran masyarakat sipil di Indonesia harus mengisi setiap peluang yang terbengkalai di jalankan negara, baik dalam bentuknya sebagai substitusi, supplement, maupun dalam menjalankan fungsi checks and balances. Pemberdayaan ekonomi di kalangan masyarakat bawah merupakan yang paling niscaya dilakukan, mengingat demokrasi mustahil dapat dijalankan secara mapan jika kondisi sebagian masyarakat dalam keadaan lapar dan terbelakang. Sebab, kemapanan demokrasi mustahil diterapkan tanpa basis kultural yang kondusif dan basis material yang memadai.

6. Referensi Bacaan

AS Hikam, Muhammad, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, LP3S, Jakarta.

Bush, Robin, 2009. *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapura.

Gellner, Ernsnest, 1981. *Muslim Society*, Cambridge University Press

Hefner, Robert (ed), 2001. *The Politics of Multiculturalism, Pluralis and Citizenship in Malaysia, Singapura, and Indoenesia*, University of Hawa'i Press.

_____, 2000a. *Civil Islam: Muslims and Democratitization in Indonesia*, diterjemahkan oleh Ahmad Baso, LP3ES, Jakarta.

- Haberbas, Jurgen, 1989. *The Struktural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into Category of Borgeois Society*, translated by Thomas Berger & Frederick Lawrence, Cambride: Polity Press.
- Huntington, Samuel P. and Harrison, Lawrence E, 2006. *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, terjemahan dari Culture matters: how values shape human progress, LP3ES, Jakarta.
- Inglehart, Roland *Budaya dan Demokrasi*, dalam Huntington, Samuel P. and Harrison, Lawrence E, 2006. *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, terjemahan dari Culture matters: how values shape human progress, LP3ES, Jakarta.
- Kaviraj, Sudipta and Khilnani, Sunil (eds), 2001. *Civil Society History and Possibilities*, Published by the Press Syndicate of University of Cambridge.
- Mujani, Syaiful, 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Yayasan Wakaf Paramadina, Freedom Institute, Kedutaan Besar Denmark.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Saidi, Anas, 2009. *Relasi Pancasila, Agama dan Kebudayaan*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 11 No. 1, 2009.

_____, 2004, *Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*, Desantara, Jakarta.

Uphoff, Norman, 1999. *Understanding Social Capital: Learning from Analysis and Experience of Participation*, in Partha Dasguta and Ismail Seragedin (eds), *Social Capital Multifaceted Perspective*, The World Bank, Washington DC.

Yudi, Latif, 2008. *Menuju Sekularisme Religius*, Makalah disampaikan pada diskusi circle Nahdhilyin Profesional, P3M, 25 Mei 2008.

DISKUSI

Komentar dan Pertanyaan Peserta:

- (1) Konsep *civil society* memang sangat luas. Oleh karena itu, konsep ini harus digunakan dengan hati-hati. Jangan mempertukarkan konsep *civil society* dengan masyarakat sipil. Dua konsep tersebut sangat berbeda. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, masyarakat sipil berarti *civilian society* dan bukan *civil society*;
- (2) Perkembangan di NU memang sangat luar biasa, mulai dari keorganisasian hingga pemikiran. Sayangnya, orang sering mengkritik hanya sesuai dengan perspektifnya. Kebijakan NU seringkali disalahtafsirkan. Sebagai contoh adalah sikap Gus Dur yang dianggap terlalu toleran menanggapi kasus Arswendo yang sangat melecehkan Islam. Bagaimana menanggapi hal semacam ini?
- (3) Islam kuat sebagai fondasi dari gerakan *civil society*. Saya tidak yakin dengan pernyataan ini. Menurut saya, ormas Islam justru semakin lemah dalam menjajah kekuasaan;

- (4) Kenapa ormas-ormas Islam yang besar khususnya, tidak menjalankan saja fungsinya sesuai dengan makna ayat? Sebagai contoh adalah surat Al-Kafiruun. Hal ini tentunya akan memudahkan implementasi fungsi dari ormas tersebut;
- (5) Saat ini memang banyak sekali terdapat perbedaan aspek terminologi maupun bahasa dalam mengkaji konsep *civil society*. Huntington dan Geertz menurut saya justru menunjukkan indikasi yang sangat bagus. Konsep keduanya dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan pemahaman kita atas realitas yang terjadi. Kalau bias, kita tidak perlu menggunakan konsep mereka karena mereka memang melihatnya dalam konteks mereka, bukan konteks kita;
- (6) Arus internasional dan tekanan domestik tidak lagi dapat dipisahkan secara hitam putih. Namun, kita perlu melihat siapa yang memiliki kekuasaan. Kecintaan terhadap dunia membuka aura politik. Akibatnya, banyak ormas kehilangan pemimpinnya ketika para pemimpin masuk ke gelanggang politik.

Tanggapan Pembicara:

Dr. Hendro Prasetyo

Saya sangat setuju dengan pernyataan bahwa arus internasional tidak lagi dapat dipisahkan dengan arus lokal. Yang perlu diperhatikan, konsep *civil society* ini mulai dimekarkan. Konsep *civil society* yang bermula dari kewargaan (lokal), belakangan mulai berkembang menjadi konsep yang luar biasa, seperti *global civil society* maupun *transnational civil society*. Hal inilah yang sebaiknya dipakai sebagai variabel untuk menjelaskan proses demokrasi maupun antidemokrasi yang sedang terjadi di Indonesia.

Pesimisme menghadapi NU dan Muhammadiyah justru akan menguatkan tesis lama yang menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi seperti yang disebutkan oleh Huntington. Menurutnya, Islam tidak kompatibel dengan demokrasi karena tidak ada sekularisasi dalam Islam. Perry Anderson yang melakukan kajian terhadap konstelasi politik dalam Islam juga menyebutkan bahwa agama dan negara seringkali menyatu sehingga tidak memunculkan kekuatan otonom di luar itu. Oleh karena itu, sekularisasi sebagai prasyarat demokrasi tampaknya ada benarnya. Ketika negara tidak represif, maka terbuka peluang baru bagi ulama untuk tidak lagi sebatas melayani umat. Peluang baru yang lebih menarik adalah masuk ke ruang negara. Oleh karena itu, tidak ada lagi kendala struktural bagi kedua ormas untuk memasuki ruang negara. Namun demikian, ada sebuah tantangan baru yang patut diwaspadai, yaitu fundamentalisme serta tantangan Islam yang lebih progresif.

Drs. Anas Saidi, MA

Penekanan tentang pentingnya ruang publik bagi proses kebebasan berpikir tentunya demi keseimbangan. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi adanya ruang publik yang hanya diisi oleh tafsir tunggal tentang berbagai wacana keagamaan. Kelompok-kelompok, seperti JIL, memiliki arti penting bagi antitesis tumbuhnya fundamentalisme. Pengimbangan itu sangat penting. Ketika sudah tidak relevan lagi, ia pasti menghilang dengan sendirinya. Saat ini tidak ada ruang yang memberikan keseimbangan untuk ormas-ormas Islam guna melakukan *ijtihad* yang dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Gus Dur dan Amien Rais adalah dua figur yang menjadi tokoh penting yang berhasil menempatkan NU dan Muhammadiyah

sebagai *civil society* di ruang yang disebut non negara itu. Gus Dur bahkan berhasil mensipilkan negara dengan membubarkan Departemen Penerangan (Deppen) maupun Departemen Sosial (Depsos) yang dianggap bagian dari *civil society*.

Ketika demokrasi berjalan di Indonesia dan kita menyetujui bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki peran dalam membangun *social consciousness*, maka konsep *ummah* yang diajukan Huntington akan gugur dengan sendirinya. Persoalannya, adalah mengapa ormas-ormas Islam kurang secara cepat dapat mengisi proses demokratisasi yang sedang berjalan menuju ke sebuah kemapanan dan keadaban? Ormas-ormas Islam justru kerap menjadi prahara yang memporakporandakan proses demokrasi yang telah berjalan selama ini.

Jika agama memang diyakini sebagai faktor penting yang berpengaruh bagi demokrasi, maka ke depan harus disusun sebuah strategi kebudayaan dari ormas Islam dalam menyadarkan proses demokrasi yang masih panjang.



ORMAS ISLAM DAN PEMBERDAYAAN UMAT

A. Dr. Endang Turmudi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: PENGALAMAN NAHDLATUL ULAMA

1. Pendahuluan

Ketika pertama kali didirikan, NU adalah organisasi sosial keagamaan dengan maksud menegakkan syariat Islam yang berhaluan *ahli sunnah wal jamaah*. Islam yang mereka kukuhkan adalah Islam yang selama itu dipraktikkan oleh masyarakat dan dikembangkan oleh para ulama, yang mereka warisi dari para ulama penyebar Islam awal di Indonesia, yaitu para Wali Songo. NU lahir karena para ulama di Jawa, di antaranya, terpanggil untuk meneruskan praktek Islam dan tradisi yang ada di dalamnya yang saat ini terancam oleh gerakan puritanisme yang terinspirasi atau terpengaruh oleh gerakan Wahabisme menyusul jatuhnya Kesultanan Turki Ottoman.

Para tokoh dan penggerak Wahabisme yang saat itu telah diadopsi sebagai ideologi kerajaan Saudi melakukan perombakan atau bahkan pembersihan terhadap segala praktek keislaman yang dianggap *bid'ah (heretic)* dan khurafat yang saat itu banyak dilakukan kalangan Muslim di sana. Mereka ingin menegakkan apa yang disebut "*pristine Islam*". Hal serupa dilakukan kalangan organisasi Islam di Indonesia yang

terinspirasi oleh Wahabisme tersebut, meskipun pemurnian yang dilakukannya tidak sedahsyat yang terjadi di daerah Saudi Arabia.

Meskipun kelahirannya adalah reaksi terhadap gerakan puritanisme tersebut, NU sudah sejak awal berdirinya telah memberi perhatian pada masalah-masalah real kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Di samping melakukan dakwah dan pendidikan, yaitu dua bidang yang menjadi garapan utamanya, NU juga memberi perhatian pada bidang ekonomi. Muncullah apa yang disebut sebagai "*Nahdlatut Tujjar*", yaitu gerakan pengembangan perekonomian yang utamanya dimaksudkan untuk mengangkat ekonomi masyarakat pribumi Jawa Muslim. Ini tentunya bagian dari garapan selain mempertahankan Islam yang sementara itu mereka praktekkan. Dan melalui tokoh kreatifnya, NU juga mengembangkan "*Tashwirul Afkar*" (pengembangan pemikiran), melalui berbagai diskusi dan bahasan-bahasan pemikiran mereka di bidang keagamaan.

Untuk sekedar memberi contoh, pada tahun 1929 NU mendirikan Cooperatie Kaoem Moeslimin di samping membentuk "*Syirkah Tijariyah*" atau koperasi niaga yang menjual produk bahan keperluan sehari-hari, seperti beras dan gula. Lembaga-lembaga ini juga mengimpor barang pecah belah setelah rencana impor sepeda dari Cina gagal. Semua upaya ini adalah bagian dari usaha menghidupkan dan mengembangkan ekonomi NU sebagai organisasi dan masyarakatnya yang menjadi garapan organisasi ini.

Setelah lebih 80 tahun usianya, NU mencoba mengintensifkan upaya-upayanya melalui berbagai macam program, karena ternyata perkembangan masyarakat yang menjadi garapannya tidak memenuhi apa yang diharapkan. Perkembangan berbagai macam masalah dalam berbagai bidang

juga telah menyebabkan NU merancang berbagai macam program baik itu untuk penguatan organisasi maupun untuk penguatan masyarakatnya, karena di samping mengembangkan atau ingin membuat suatu wadah yang kuat yang mengantarkan masyarakat, NU juga merasa harus lebih memperkuat masyarakat itu sendiri sebagai subyek untuk mempertahankan baik kepercayaan keagamaan maupun tradisi yang berkembang dan menjadi kebudayaan serta kehidupan sosial ekonominya.

Muktamar ke 31 NU telah mengamanatkan kepada PBNU hal-hal yang bersifat strategis di samping masalah-masalah yang berkaitan dengan program kerja selama lima tahun ke depan. Memantapkan khittah yang sekaligus juga menetapkan diri untuk tidak tergoda lagi dengan masalah-masalah politik praktis adalah bagian penting yang ditelorkan oleh Muktamar tersebut. Perhatian juga diberikan untuk memantapkan kembali masalah pengkaderan dengan mana NU bisa melahirkan para calon pemimpin yang kelak bukan saja berjuang untuk NU tetapi juga sekaligus memahami prinsip-prinsip, norma serta tradisi yang berkembang di lingkungan NU sebagai "*jam'iyah diniyyah*" dengan warganya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam perjalanannya, terdapat juga masalah-masalah kontemporer yang tidak merupakan bagian dari program atau apa yang dirumuskan atau diamanatkan oleh Muktamar. Perkembangan sosial-politik, ekonomi dan yang lainnya adalah bagian kenyataan yang harus direspon oleh NU dalam upaya mengabdikan kepada umat dan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat terdapat masalah-masalah yang muncul yang memerlukan respon cepat dari NU untuk bisa dijadikan dasar dan jalan bagi mereka dalam memecahkan masalah mereka, tetapi ada pula masalah yang memerlukan kejelasan posisinya

dari sudut pandangan agama. Bahkan ada juga masalah-masalah yang pragmatis dan aktual yang berkaitan dengan kepentingan NU sebagai jam'iyah.

Selain itu, apa yang cukup penting adalah berkaitan dengan politik NU sebagai jam'iyah, sehubungan dengan berkembangnya politik praktis dan partisan yang muncul di kalangan masyarakat NU. Dengan tetap berpegang kuat pada khittahnya, NU telah memberikan respon terhadap masalah-masalah yang masuk dalam wilayah politik tadi. NU dalam hal ini berpartisipasi dalam kehidupan politik kenegaraan, menjadi pengimbang dan bahkan juga menjadi penunjuk jalan yang sebaiknya dilalui oleh bangsa Indonesia. Politik yang dijalankan dalam partisipasi ini adalah politik kebangsaan dan politik keumatan di mana perhatian tidak diarahkan bagi diraihnya kepentingan-kepentingan dan kekuasaan temporer golongan melainkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan. Politik yang dipegang oleh NU bukanlah politik partisan seperti halnya dilakukan oleh partai politik tetapi politik yang bisa memberdayakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan agar bisa berdaya dalam berbagai bidang kehidupan mereka.

Di luar bidang-bidang di atas NU juga telah melakukan serangkaian kegiatan "*bahsul masail*" baik yang *waqi'ah* maupun *maudlu'iyah*. Beberapa tema masalah keagamaan telah menjadi pembahasan mulai dari *bahsul masail* pada umumnya sampai pada pembahasannya di Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006. Di samping itu tentu saja PBNU juga ikut aktif mempertimbangkan dan merespon masalah-masalah keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sifat akomodatif dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama terus menandai peran NU dalam masyarakat. Dalam hal ini NU terus menyeimbangkan pelaksanaan prinsip toleransi

dan fanatisme dalam beragama dengan mempertimbangkan kemaslahatannya bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Para ulama NU terus membuka diri dengan tanpa kehilangan pijakan mereka dalam merespon masalah-masalah yang muncul.

Di bawah akan dikemukakan beberapa program yang berkaitan terutama dengan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat NU. Setidaknya inilah program yang diprioritaskan oleh NU selama lima tahun belakangan ini.

2. Pendidikan

Dari sekian program yang diputuskan dalam Mukhtamar ke 31 NU di Asrama Haji Donohudan, Solo, PBNU telah memprioritaskan beberapa bidang garapan, sehubungan dengan urgensinya dan kemendesakannya bagi warga NU. Di antara bidang yang mendapatkan perhatian prioritas NU adalah pendidikan. Bidang ini harus mendapatkan perhatian karena maju tidaknya NU akan sangat tergantung pada maju tidaknya pendidikan yang dikelola masyarakatnya, mengingat mayoritas warga NU dididik dalam lembaga-lembaga pendidikan NU. Yang termasuk dalam bidang pendidikan ini adalah pesantren dan madrasah serta sekolah-sekolah yang berada dalam lingkungan dan dikelola oleh masyarakat NU.

a. Pesantren, Madrasah dan Sekolah

Madrasah-madrasah yang dikelola baik oleh para kiai maupun yayasan di lingkungan NU yang jumlahnya lebih dari 16 ribu adalah aset yang cukup berharga bagi kemajuan NU di masa depan. NU dengan jumlah lembaga pendidikannya serta pahamnya yang moderat serta budayanya yang akomodatif diharapkan bisa menjadi "*center of excellent*", yang melalui lembaga pendidikannya akan mencetak manusia-manusia yang

berilmu Islam tinggi dan berwawasan luas serta fanatik dalam memegang teguh agamanya tetapi toleran terhadap perbedaan-perbedaan. Akan tetapi harus diakui bahwa madrasah-madrasah di lingkungan NU masih memerlukan penanganan dan sekaligus peningkatan kualitasnya, karena mereka harus bersaing baik dengan madrasah lain maupun dengan sekolah-sekolah umum. Karena itulah, peningkatan kualitas menjadi perhatian NU, yang tentu saja menyangkut kualitas para lulusan madrasahya sendiri, kualitas para gurunya serta kelengkapan fasilitas dan lain-lainnya.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas ini, NU berusaha bekerjasama dengan lembaga terkait, baik dalam maupun luar negeri. Sebuah *training* di bidang keterampilan bagi guru-guru bidang, misalnya pernah dilakukan dengan bekerjasama bersama Hanns Seidel Foundation (HSF). *Training* ini diaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para guru bidang, yaitu bidang kelistrikan, otomotif, dan lain-lain. *Training* ini untuk pertama kali dilakukan di Banda Aceh pada awal 2006. Keinginan PBNU untuk meningkatkan bidang ini, ditindaklanjuti dengan kunjungan pengurus PP LP Ma'arif bersama PBNU ke Provinsi Shandong Beijing, Cina, untuk melihat bagaimana pola pembinaan dalam bidang kelistrikan dan otomotif yang dilakukan di sana. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan NU bisa mendirikan "*Vocational School*" yang komprehensif di mana murid-murid madrasah dibekali keterampilan khusus yang bisa dijual ketika mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Upaya peningkatan lain yang dilakukan oleh PBNU di bidang pendidikan adalah dengan melengkapi madrasah-madrasah dengan media pembelajaran yang cukup modern.

Dengan bantuan dari Departemen Agama RI (Depag) dan juga dari Pemda Provinsi Jawa Timur, beberapa madrasah berhasil mendapatkan *software* pesona fisika dan matematika, yang merupakan barang baru bagi madrasah-madrasah di lingkungan NU. Mengingat pentingnya media ini bagi peningkatan kualitas siswa di dua bidang penting non-pelajaran agama, maka PBNU berusaha membantu madrasah-madrasah NU untuk mendapatkannya. Dengan mendapatkan media pembelajaran ini, para guru bidang di madrasah bisa mengajar para siswanya dengan cara yang sangat modern, yaitu dengan menggunakan *software* dan komputer serta LCD. *Software* yang didesain sedemikian rupa ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas capaian para siswa di dua bidang Fisika dan Matematika.

Hal lain yang dilakukan dengan Depag adalah pemberian beasiswa kepada para siswa Aliyah dari pesantren yang berprestasi dan punya minat melanjutkan ke Perguruan Tinggi Umum. Dengan hadirnya undang-undang sisdiknas yang membuka sistem multi-entri dan multi-eksit, maka para lulusan Aliyah sangat mungkin masuk ke Perguruan Tinggi Umum dan mempelajari bidang-bidang umum. Melalui program ini sudah terjaring ratusan siswa dari Aliyah pesantren yang masuk dalam program beasiswa Depag, dan mereka rata-rata mengambil bidang umum di beberapa perguruan tinggi, seperti ITS, UNAIR, Gajah Mada dan ITB.

b. Pendidikan Luar Negeri

Ketetapan PBNU untuk memajukan bidang ini memang telah begitu kuat, karena memajukan pendidikan adalah keniscayaan. Bahkan harapan PBNU untuk bisa memfasilitasi atau menjembatani para murid madrasah untuk mendapatkan pendidikan luar negeri juga cukup kuat. Pendidikan di luar

negeri harus diakui mempunyai kelebihan, dengan mana anak-anak NU bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi di bidang yang dikuasainya, dan pada sisi lain pengalaman di luar negeri itu bisa juga menjadi media belajar, baik itu mengenai budaya asing maupun juga bagaimana memahami dan mensikapi perbedaan budaya maupun paham keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Di samping itu, apa yang paling jelas adalah bahwa belajar di luar negeri akan memberi siswa kemampuan bahasa asing yang diperlukan.

Untuk maksud tersebut, Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi, pada tahun 2003 menugaskan kepada LP Ma'arif untuk memfasilitasi sekitar duapuluh anak muda NU yang sudah lulus S1 untuk mengikuti kursus intensif bahasa Inggris. Dimaksudkan dengan ini agar mereka bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan memenuhi persyaratan, baik TOEFL atau IELTS yang disyaratkan bagi mereka yang mau memasuki perguruan tinggi di universitas-universitas berbahasa Inggris. Meskipun maksud tersebut belum tercapai, akan tetapi beberapa anak muda NU lainnya bisa dikirim untuk mengikuti program S2, di antaranya di sebuah universitas di Inggris dan Singapura.

Sebuah program yang cukup berhasil berkaitan dengan pengiriman kalangan muda NU keluar negeri telah dilakukan melalui kerjasama PBNU dengan *British Council*. Program ini bermula dari pembicaraan Ketua Umum PBNU dan Dubes Inggris Mr. Richard Gorosney tahun 2003 yang kemudian diteruskan oleh Dubes Inggris Mr. Charles Humprey yang menghasilkan kesepakatan untuk melatih kader-kader pesantren dari NU untuk belajar manajemen pendidikan di Inggris. Meskipun program ini adalah *non-degree* tetapi hal ini cukup memberikan pencerahan dan mendorong minat di kalangan

muda untuk mengikutinya. Dalam kaitan program ini, PBNU telah mengirimkan rombongan pertama terdiri dari 12 tokoh muda pesantren. Rombongan tersebut adalah dari pesantren Maslakhul Huda, Pati, Jawa Tengah, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dan dari Al Hikam Malang, Jawa Timur. Rombongan kedua, ketiga dan keempat selanjutnya berangkat ke Universitas Leeds untuk pelatihan manajemen pendidikan selama 1 bulan. Dalam rombongan kedua ini telah dikirim sebanyak 20 orang dari kalangan madrasah dan pesantren. *Short training* yang lamanya sebulan ini dimaksudkan untuk membekali para manajer madrasah dan pesantren dalam melaksanakan tugas memanager pesantren dan madrasah mereka. Untuk memantapkan hasil yang dicapai setiap anggota rombongan sepulang dari *training* harus melakukan seminar di pesantren dan madrasah masing-masing dengan maksud untuk menyebarkan ilmu dan keterampilan yang didapat dari *training* tersebut.

Dari program-program pengiriman kader-kader NU ke luar negeri untuk mengambil program pendidikan lanjutan, apa yang berhasil adalah melalui kerjasama dengan universitas-universitas di Timur Tengah. Dalam hal ini, koordinator program ini telah memberangkatkan kader NU ke Libya (7 orang), Sudan (5 orang) serta Maroko dan Syria. Keberhasilan ini karena dari sisi bahasa, kader-kader NU yang dikirim yang kebetulan dari pesantren juga tidak mengalami halangan bahasa.

Selain Timur Tengah, rintisan kerjasama dengan pemerintah India telah menarik perhatian kalangan muda NU yang mau meneruskan pendidikan di negeri India. Dimulai pada tahun 2008, pemerintah India memberikan kesempatan beasiswa kepada kalangan muda NU untuk belajar tingkat S1, S2 dan S3 di universitas-universitas di India. Pada tahun 2008 hanya ada 1

anak muda NU yang melamar dan diterima di fakultas ekonomi di Osmania University di Hyderabad. Pada tahun 2009, terdapat 52 anak NU yang melamar untuk beasiswa tersebut. Tetapi PBNU kehilangan kontak, karena hanya 1 orang yang melapor lulus dan pergi ke India. Pada tahun 2010 ini 22 anak muda NU melamar beasiswa ini, dan sampai saat ini belum diketahui berapa orang dari mereka yang lulus tes.

3. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Undang-undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 juga dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. SDM yang berkualitas merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan.

Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indikator kesehatan yang menjadi bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus tetap ditingkatkan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan haruslah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna. Derajat kesehatan masyarakat bisa ditunjukkan melalui perbaikan umur harapan hidup (*life expectancy*), penurunan angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Di Indonesia pembiayaan kesehatan sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Persentase pengeluaran nasional sektor kesehatan telah meningkat sebesar 0,81% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2005 menjadi 1,09% pada 2007, meskipun belum mencapai 5% dari PDB seperti dianjurkan WHO. Anggaran kesehatan juga meningkat dari Rp.11.114 triliun pada 2005, menjadi Rp.18.750 triliun pada tahun 2007. Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terus meningkat, namun kontribusi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan masih kecil yakni hanya 38% dari total pembiayaan kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disebutkan bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan yang dihadapi antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu konsistensi penyakit infeksi menular yang diderita masyarakat dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

Beberapa tantangan di bidang kesehatan adalah:

- (1) Penduduk Indonesia akan bertambah banyak dengan piramida penduduk yang terus berubah;
- (2) Konsistensi beban ganda penyakit, yaitu di satu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, di lain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular. Selain itu beberapa penyakit infeksi cenderung meningkat kembali

(*re-emerging diseases*) seperti TB, dan malaria. Penyakit infeksi baru (*new emerging diseases*) juga telah muncul, utamanya yang disebabkan karena virus seperti: HIV/AIDS, SARS, dan flu burung (*avian influenza*);

- (3) Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kerjasama lintas setor dan dukungan peraturan perundangan belum maksimal. Adanya kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, gender, dan antar kelompok tingkat sosial ekonomi; pelayanan kesehatan reproduksi yang masih lemah; serta terbatasnya jumlah dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan. Dalam pembiayaan kesehatan di masa depan diharapkan hampir seluruh penduduk Indonesia telah dicakup oleh sistem jaminan kesehatan sosial;
- (4) Dewasa ini belum memadainya jumlah, penyebaran komposisi dan mutu tenaga kesehatan. Merupakan tantangan bagi pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, bahwa menjelang 2025 pemenuhan seluruh kebutuhan SDM Kesehatan bagi pembangunan kesehatan harus telah tercapai;
- (5) Tantangan global yang dihadapi adalah upaya dalam pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs). Tantangan global lainnya antara lain adalahantisipasi perdagangan bebas, dan sumber daya kesehatan yang ikut mengglobal. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta pelayanan publik melalui kesepakatan *General Agreement on Trade in Service* (GATS) dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), dimulainya pasar bebas ASEAN pada tahun 2010 dan pasar

bebas Asia Pasifik pada tahun 2020 akan memengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Dengan melihat paparan di atas memang jelaslah bahwa masalah kesehatan kesehatan problematik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bahkan dirasa sangat memberatkan oleh kalangan miskin, karena biaya pengobatan, misalnya masih jauh dari jangkauan atau kemampuan mereka. NU sebagai komponen bangsa yang anggotanya tersebar dan terutama di daerah pedesaan menyadari tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia, lebih-lebih mereka yang berada di daerah pedesaan yang mayoritasnya adalah miskin. Tantangan ini sekaligus tantangan bagi NU, mengingat warga NU tinggal di daerah pedesaan. Dengan kata lain, tantangan yang dikemukakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, juga merupakan tantangan bagi NU. Karenanya, PBNU merasa perlu untuk memberikan prioritas programnya di bidang kesehatan ini.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Salah satu program dasar yang diputuskan oleh Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama di Donohudan, Solo, tahun 2004 adalah masalah Pemberdayaan Ekonomi Umat. Pemberdayaan ekonomi umat adalah bagaimana mengupayakan agar warga NU memiliki keberdayaan (kemampuan) untuk meningkatkan kesejahteraan secara sosial ekonomi, tidak hanya sekedar mampu memenuhi kebutuhan makan-minumnya sehari-hari. Diharapkan bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarganya di bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup secara layak lainnya.

Wacana pemberdayaan ekonomi warga NU sebenarnya sudah terdengar sejak dulu. Namun, hal tersebut belum bisa

maksimal dalam implementasinya mengingat setelah reformasi terjadi, di mana demokratisasi menjadi euforia masyarakat, wacana utama PBNU masih terfokus pada isu politik praktis dan pemikiran teologis keagamaan Aswaja. Meskipun demikian, melihat pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya PBNU telah memberikan perhatian besar pada program-program pemberdayaan ekonomi warga NU dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Pemberdayaan ekonomi bagi warga NU akan mengangkat harkat dan martabat warga NU pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Melalui kemandirian ekonomi maka kemandirian lainnya juga akan dapat dicapai, karena masyarakat yang mandiri dan kuat secara ekonomi akan mempunyai kekuatan untuk melakukan berbagai hal termasuk memperkuat kemandirian politik dan sosial.

PBNU telah berusaha melalui Lembaga Perekonomian NU dan Lembaga Pertanian NU untuk membangkitkan kembali semangat berekonomi dan berwirausaha di tengaharganya. NU seperti bisa dilihat sepanjang sejarahnya tidak saja hadir dengan bangunan tradisi keilmuan dan keagamaan (*Tashwirul Afkar*), serta semangat kebangsaan dan politik (*Nahdlatul Wathon*). Lebih dari itu, NU juga dibangun dan membangun kekuatan ekonomi umatnya (*Nahdlatul Tujjar*). Tiga fondasi itulah yang menjadi pilar penyokong berdirinya NU tahun 1926. *Nahdlatul Tujjar* yang artinya kebangkitan para pedagang, merupakan gerakan ekonomi yang bertujuan menguatkan sendi-sendi perekonomian rakyat dan berbagai bentuk usaha bersama seperti koperasi dan pengembangan usaha kecil. Dengan demikian, NU bukan gerakan keagamaan dalam arti sempit, tetapi juga gerakan ekonomi kerakyatan untuk mensjahterakan kehidupan rakyat.

Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi umat juga merupakan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi persoalan bangsa paling memprihatinkan dengan berbagai dampak buruk yang dilahirkannya. Kasus kelaparan dan gizi buruk di banyak daerah, perebutan lahan pekerjaan, putus sekolah, dan sekian banyak kasus konflik sosial dan cerita memilukan dalam rumah tangga karena keterbatasan kebutuhan hidup adalah masalah-masalah serius di bidang perekonomian yang dihadapi bangsa Indonesia. Karena itulah, jumlah warga miskin di Indonesia ini cukup tinggi dan kelihatannya sulit menurun, karena di samping masyarakat pada umumnya *powerless* atau tidak berdaya, juga karena pemerintah belum maksimal memberi jalan keluar dari masalah ini.

Menurut data yang ada (Februari 2005) terdapat sekitar 35,1 juta orang yang masuk dalam kategori miskin di Indonesia (15,91%). Jumlah ini bahkan naik menjadi 39 juta (17,75%) pada bulan Maret 2006. Tingkat prevalensinya memang agak berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk daerah pedesaan, jumlah orang miskin ini mencapai 63,4%. Dalam hal kemiskinan ini, Indonesia masuk dalam Peringkat ke 110 terburuk di Asteng setelah Kamboja.

Perkembangan kemiskinan ini memang cukup memprihatinkan. Menurut catatan *World Bank* (2006) masih terdapat sekitar 108,7 juta penduduk Indonesia yang rentan terhadap kemiskinan. Sebagian besar mereka ada di pedesaan (63,52%) yang berarti pula mereka adalah warga NU yang diperkirakan mencapai 35% dari seluruh penduduk Indonesia (Survei Nasional LSI, 2004). Ini artinya bahwa sebagian besar dari rakyat Indonesia yang miskin itu adalah warga NU. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas

program NU yang diupayakan melalui program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan terutama oleh LPNU.

Program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan oleh PP LPNU terwujud dalam program dan kegiatan yang sifatnya memberdayakan warga NU yang berkecimpung sebagai pengusaha mikro kecil (UMK) di sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan industri rumah tangga berskala mikro kecil. UMK merupakan 99,9% dari seluruh pelaku ekonomi nasional sehingga merepresentasikan ekonomi rakyat dalam arti yang sesungguhnya, yakni tempat rakyat mencari penghidupannya sehari-hari. UMK adalah sektor yang menyerap sebagian besar tenaga kerja khususnya tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor-sektor formal. Selain itu UMK dapat menjadi solusi bagi masalah kemiskinan, karena pada dasarnya UMK adalah bagian dari masyarakat miskin namun mereka merupakan kelompok yang mempunyai kemauan kuat dan kemampuan produktif.

5. Penutup

Hal lain yang berkaitan dengan *capacity building* adalah upaya-upaya menampilkan NU sebagai organisasi Islam yang moderat. NU juga berusaha untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan keagamaan maupun pengetahuan lain yang dapat mendukung program-program NU. Dalam konferensi internasional, terdapat isu penting yang diangkat NU, yaitu mencoba menampilkan bahwa Islam *rahmatan lil 'alamin*, yang berarti bahwa Islam tidak saja menjadi rahmat bagi umat Islam, tetapi juga seluruh umat/makhluk lainnya.

Selain itu, NU Online merupakan media komunikasi yang dibangun untuk menjembatani komunikasi internal maupun eksternal NU, termasuk untuk penyebaran informasi.

B. Dr. Abdul Mu'ti

**ORMAS ISLAM DAN
MASALAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:
PENGALAMAN MUHAMMADIYAH**

1. Pendahuluan

Sejak awal kelahirannya pada tahun 1912, Muhammadiyah adalah gerakan sosial-keagamaan berbasis massa (*community-based movement*) yang diorganisir dengan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen yang khas. Muhammadiyah lahir dalam alam politik kolonial di mana masyarakat (termasuk umat Islam) hidup dalam penderitaan yang disebabkan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.¹ Pembentukan Muhammadiyah oleh elit-priyayi dan santri Jawa merupakan respon konstruktif dan perwujudan tanggungjawab sosial kaum beriman terhadap problematika kehidupan masyarakat.²

Sebagai gerakan berbasis massa, Muhammadiyah mengembangkan gerakan kultural yang berusaha membangun peradaban masyarakat, umat dan bangsa melalui pembangunan

¹Margono Poespo Suwarno, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Persatuan Baru, cetakan ke-5, 2005), hlm. 8.

²Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Muhammadiyah Periode Awal*, (Surabaya: LPAM, 2002), hlm. 149.

individu. Sesuai dengan prinsip partisipatori, Muhammadiyah memusatkan kegiatannya kepada manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berperan sebagai inisiator, aktor dan sasaran yang aktif dan mandiri. Muhammadiyah berusaha membangun karakter individu dengan pembentukan pola-pikir (*state of mind*) dan tata-laku (*behaviour*) yang utama. Melalui berbagai usaha, program dan aktivitasnya, Muhammadiyah tak pernah mengenal lelah berusaha bagaimana menjadikan individu sebagai pribadi beriman yang *knowledgeable* (melek informasi) *capable* (terampil) dan *responsible* (bertanggung jawab).

Di dalam setiap gerak-langkahnya, Muhammadiyah berjuang agar masyarakat mendapatkan akses informasi dan pengetahuan yang seluas-luasnya, pendidikan dan ketrampilan yang sebaik-baiknya dan ladang pengabdian yang tak terbatas. Untuk itu, Muhammadiyah tidak mengisolasi diri dari dinamika politik yang berkembang dalam konteks lokal, nasional dan internasional. Muhammadiyah memahami dan menyadari betapa politik sebagai faktor eksternal turut mempengaruhi perilaku, strategi dan model gerakan.³

Makalah ini akan membahas bagaimana kiprah Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat. Pada bagian **pertama** dijelaskan tentang identitas Muhammadiyah sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan pada bagian ini lebih bersifat normatif-ideologis sebagaimana tertuang dalam pedoman formal organisasi. Bagian **kedua** membahas tentang usaha Muhammadiyah dalam pemberdayaan

³Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1989).

masyarakat. Bagian ini mengkaji bagaimana Muhammadiyah menerjemahkan konsep dakwah sebagai strategi utama pemberdayaan masyarakat. Bagian **ketiga** menelaah berbagai problematika dan tantangan Muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat sekarang dan masa depan.

2. Identitas dan Tujuan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pemberdayaan Masyarakat

Sejak awal kelahirannya, Muhammadiyah berusaha untuk memajukan Islam dan masyarakat. Islam adalah landasan yang menjadi sumber inspirasi bagi Muhammadiyah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat. Istilah masyarakat tidak secara eksklusif merujuk kepada mereka yang beragama Islam (umat Islam, Muslim) tetapi secara inklusif untuk seluruh komponen masyarakat tanpa memandang agama, suku dan bangsa. Muhammadiyah tidak memisahkan antara urusan agama dengan masyarakat. Memajukan masyarakat merupakan salah bagian dari tugas agama.

Orientasi keislaman dan kemasyarakatan menyatu dalam seluruh aktivitas Muhammadiyah. *Statuten* Muhammadiyah yang disusun sebagai administrasi pendirian organisasi secara eksplisit menyebutkan bahwa hasrat Muhammadiyah adalah untuk: (a) Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Islam di Hindia Netherland, dan (b) Memajukan dan menggembirakan cara kehidupan sepanjang kemauan agama Islam kepada *lid-lidnya* (anggota).⁴ Muhammadiyah menggariskan agar di dalam kehidupan manusia senantiasa

⁴Statuten Muhammadiyah, artikel 2, Abdul Munir Mulkhan, *Warisan Intelektual KH. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1990), hlm. 138.

berpedoman pada Tauhid yang murni dan hidup bermasyarakat.⁵

Visi integrasi antara kehidupan keagamaan dengan kemasyarakatan tersurat jelas di dalam kepribadian Muhammadiyah. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah memiliki sepuluh sifat dan kepribadian. Sifat-sifat tersebut adalah (1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, (2) Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, (3) Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam, (4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, (5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar falsafah negara yang sah, (6) Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan dan menjadi contoh teladan yang baik, (7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan, sesuai ajaran Islam, (8) Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya, (9) Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah, (10) Bersikap adil dan korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.⁶

Orientasi gerakan Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan semakin jelas dalam rumusan khittah perjuangan

⁵Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pokok pikiran kedua.

⁶Haedar Nashir, Memahami Manhaj Gerakan Muhammadiyah, dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP. Muhammadiyah, 2009), hlm. xx.

dan identitas gerakan. Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber kepada Alquran dan As-Sunnah, bercita-cita untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Terkait dengan bidang muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah.⁷

Selain orientasi keislaman dan kemasyarakatan, khittah Muhammadiyah juga berorientasi kebangsaan ke-Indonesiaan. Dalam khittah yang dirumuskan paska Tanwir Ponorogo tahun 1969 itu Muhammadiyah mengajak kepada bangsa Indonesia untuk bersyukur atas nikmat Allah berupa tanah air yang subur dan sumberdaya alam yang kaya raya. Muhammadiyah juga mengajak segenap lapisan masyarakat untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila dan bersama-sama berusaha menjadikan Indonesia sebagai negeri yang adil dan makmur dan diridloi Allah, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.⁸

Sesuai dengan khittah tersebut, Muhammadiyah menegaskan identitas dirinya sebagai gerakan dakwah yang

⁷Haedar Nashir, Memahami Manhaj..... dalam PP. Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan....*, hlm. xxiii.

⁸Haedar Nashir, Memahami Manhaj..... dalam PP. Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan....*, hlm. xxiii.

berorientasi kemasyarakatan, bukan politik Islam. Di dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah "Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah"⁹ yang bertujuan untuk "menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya."¹⁰ Dengan orientasi masyarakat ini, Muhammadiyah memperjuangkan substansi ajaran Islam bukan format dan simbol-simbol. "Muhammadiyah tetap berada dalam kisaran gerakan Islam untuk membangun masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, bukan pada cita-cita membangun negara Islam."¹¹ Karena itu, secara politik, Muhammadiyah tidak pernah mempersoalkan eksistensi Pancasila sebagai Dasar Negara.¹²

⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar Muhammadiyah*, pasal 4 (1).

¹⁰*Anggaran Dasar Muhammadiyah*, pasal 6.

¹¹Haedar Nashir, Konsep dan Pembentukan Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya, dalam Sudibyo Markus, et.al., *Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya: Sumbangan Pemikiran*, (Jakarta: Civil Islamic Institute, 2009), hlm. ix.

¹²Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Azas Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989). Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985, Muhammadiyah mencantumkan Pancasila sebagai azas organisasi. Meskipun, 15 tahun kemudian, dalam Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, Muhammadiyah menghapus azas Pancasila dan mencantumkan azas Islam. Penghapusan ini sama sekali tidak berarti Muhammadiyah menolak Pancasila, karena dalam Sidang Tanwir di Yogyakarta, 25 April 2007, Prof. Din Syamsuddin, ketua umum PP. Muhammadiyah, menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang final bagi negara Indonesia.

Sampai saat ini, format atau kriteria masyarakat Islam yang sebenar-benarnya belum dirumuskan secara resmi. Dokumen-dokumen organisasi menyebutkan secara *interchange* istilah "masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" dengan "masyarakat utama", dan "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*". Meskipun formulasi istilah tersebut berbeda-beda, ketiganya mengandung substansi yang sama sebagaimana cita-cita masyarakat madani atau *al-madinat al fadhilah*.¹³ Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya memiliki enam karakteristik. Pertama, umat yang beriman, bertaqwa, menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*, dan bersatu hati serta menegakkan persaudaraan Islam. Kedua, umat yang terbaik atau pilihan. Yaitu umat yang senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan melakukan aktivitas yang terbaik. Ketiga, umat yang hidup dengan teratur, mematuhi aturan hidup bersama dan tujuan kolektif yang jelas. Keempat, umat yang memiliki sikap *welas asih*, tidak keras kepala, pemaaf, mempunyai dan mengembangkan tradisi syura dalam menyelesaikan berbagai masalah dan melibatkan Allah dalam setiap aktivitas. Kelima, umat yang berjiwa *izzah* (percaya diri) terhadap siapapun, termasuk terhadap yang tidak seakidah dan seiman, dan mengaitkan segala aktivitasnya dalam rangka mencari ridla Allah dan wujud cinta kepada Allah dan rasul-Nya. Dengan kata lain, umat yang mengembangkan sikap terbuka dan toleran dalam berinteraksi dengan masyarakat lainyang berbeda agama dan akidah. Keenam, umat yang

¹³Haedar Nashir, Konsep dan Pembentukan... dalam Sudibyo Markus, et.al, *Masyarakat Islam* xi.

moderat dan teladan, konsisten di dalam menjalankan Syariah dengan tidak sikap yang tidak terlalu kaku dan permisif.¹⁴

3. Usaha Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sistem Organisasi dan Jaringan

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.¹⁵ Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan berbagai usaha yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan-kegiatan.¹⁶ Sebagai gerakan dakwah, maka seluruh kiprah Muhammadiyah ditujukan untuk mengajak individu dan masyarakat agar memeluk dan mengamalkan ajaran Islam atau untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan nyata.¹⁷

Bagi Muhammadiyah, dakwah bukanlah proses "Islamisasi" dalam pengertian memaksakan individu atau masyarakat agar memeluk Islam, tetapi melaksanakan aktivitas yang dengannya individu dan masyarakat mendapatkan kerahmatan Islam. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memaknai dakwah sebagai "pembangunan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kemiskinan, memerangi kebodohan dan keterbelakangan, serta pembebasan.... Dengan pembebasan,

¹⁴Sudibyo Markus, et.al, *Masyarakat Islam yang Sebenarnya: Sumbangan Pemikiran*, (Jakarta: Civil Islamic Institute, 2009), hlm. 18-23.

¹⁵*Anggaran Dasar Muhammadiyah*, pasal 7 (1).

¹⁶*Anggaran Dasar Muhammadiyah*, pasal 7 (2).

¹⁷Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dakwah Kultural Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cetakan ke-2, 2005), hlm. 20.

pembangunan dan penyebarluasan ajaran Islam, dakwah merupakan proses untuk mengubah kehidupan manusia atau masyarakat dari kehidupan yang tidak islami menjadi suatu kehidupan yang islami.”¹⁸

Dalam mencapai maksud dan tujuannya, secara umum, Muhammadiyah memiliki 14 usaha yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan. Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, 14 usaha Muhammadiyah tersebut meliputi:

- (1) Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta menyebarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan;
- (2) Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya;
- (3) Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya;
- (4) Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia;
- (5) Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian;
- (6) Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas;
- (7) Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

¹⁸Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dakwah Kultural...* hlm. 20-21.

- (8) Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan;
- (9) Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri;
- (10) Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- (11) Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan;
- (12) Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumberdana untuk menyukseskan gerakan;
- (13) Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat;
- (14) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.¹⁹

Usaha-usaha tersebut dilaksanakan secara bersama-sama oleh pimpinan, anggota, majelis, lembaga dan amal usaha Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah terdiri dari pimpinan Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dan Pusat. Struktur organisasi gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem *bottom-up* di mana eksistensi kepemimpinan organisasi ditentukan oleh struktur paling bawah (Ranting). Pimpinan Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.²⁰

¹⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, pasal 3.

²⁰*Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, pasal 5 (1).

Selanjutnya, dengan sistem bottom-up ini, Pimpinan Cabang dapat dibentuk apabila memiliki sekurang-kurangnya tiga (3) Ranting,²¹ Pimpinan Daerah memiliki sekurang-kurangnya tiga (3) Cabang²² dan Pimpinan Wilayah memiliki sekurang-kurangnya tiga (3) Daerah.²³

Sesuai dengan peranannya sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat, pendirian struktur pimpinan Muhammadiyah tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah anggota tetapi juga kegiatan dan amal usaha. Pimpinan Ranting Muhammadiyah sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pengajian/kursus untuk anggota dan masyarakat yang diselenggarakan secara reguler setiap bulan, memiliki mushalla/surau/langgar sebagai pusat kegiatan serta memiliki jamaah.²⁴ Selain sebagaimana persyaratan Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pengajian/kursus untuk pimpinan, anggota dan masyarakat, memiliki korps muballigh sekurang-kurangnya 10 orang serta kantor dan amal usaha berupa Taman Pendidikan Al-Qur'an/Madrasah Diniyyah/Sekolah Dasar dan kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan.²⁵

Persyaratan pembentukan struktur kepemimpinan semakin meningkat di level kepemimpinan Daerah dan Wilayah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah harus menyelenggarakan kegiatan pengajian/kursus untuk pimpinan, anggota dan muballigh/muballighat, pengakajian masalah-masalah agama

²¹ *Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, pasal 6 (1).

²² *Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, pasal 7 (1).

²³ *Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, pasal 8 (1).

²⁴ *Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, pasal 5 (2).

²⁵ *Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, pasal 6 (2).

dan pengembangan pemikiran Islam, kursus kader Pimpinan Tingkat Daerah, memiliki muballigh/muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya 20 orang, memiliki kantor dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah serta amal usaha dalam bidang sosial, ekonomi dan kesehatan.²⁶

Pimpinan Wilayah harus menyelenggarakan pengajian/kursus berkala untuk pimpinan, anggota, unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom tingkat Wilayah, pengajian/kursus untuk muballigh/muballighat tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sebulan sekali, kursus kader Pimpinan tingkat Wilayah dan pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam. Selain itu, Pimpinan Wilayah juga harus memiliki sekurang-kurangnya 30 muballigh/muballighat tingkat Wilayah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Muallimin/Muallimat/Pondok Pesantren dan amal usaha dalam bidang sosial, ekonomi dan kesehatan.²⁷

Dengan ketentuan-ketentuan organisasi tersebut terlihat jelas bagaimana peranan dan fungsi Muhammadiyah sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, secara umum Muhammadiyah melakukan tiga bidang kegiatan utama. **Pertama**, pendidikan masyarakat baik dalam bentuk pendidikan formal maupun *public-education* yang meliputi pengajian, kursus, pelatihan, penyebaran informasi kepada masyarakat dan kegiatan kependidikan lainnya yang memungkinkan masyarakat mengembangkan wawasan, meningkatkan ketrampilan dan memperkuat kepribadian sebagai bekal kehidupan. **Kedua**, pemberdayaan masyarakat dengan

²⁶ *Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, pasal 7 (2).

²⁷ *Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, pasal 8 (2).

membuka akses, kesempatan dan jaringan yang memungkinkan masyarakat mengambil prakarsa, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan yang bermanfaat untuk tercapainya kesejahteraan hidup. **Ketiga**, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat luas dalam bentuk bantuan advokasi, pendampingan dan santunan yang produktif dalam bidang ekonomi, hukum dan sosial.

Di dalam melaksanakan usahanya, Muhammadiyah mengembangkannya dengan semangat dan prinsip kemandirian. Prinsip-prinsip kemandirian tersebut meliputi: (1) *Self-initiative*: pendirian Muhammadiyah dan amal usahanya merupakan inisiatif murni dari anggota sebagai wujud pengamalan Islam dan tanggung jawab sosial; (2) *Self-management*: pengelolaan dikembangkan dengan sistem organisasi yang solid, kolektif-kolegial sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen profesional dan pedoman pengelolaan amal usaha yang ditetapkan persyarikatan Muhammadiyah; (3) *Self-funded*: pendanaan yang mandiri, tidak mengandalkan atau tergantung pada bantuan dari pihak-pihak lain di luar Muhammadiyah.

Terkait dengan tiga prinsip kemandirian ini, Muhammadiyah mengembangkan sistem profesional dan terbuka. Muhammadiyah terbuka untuk bekerjasama dengan pihak-pihak manapun sesuai dengan semangat kemitraan, saling mendukung dan tanggungjawab bersama. Atas dasar ini, Muhammadiyah tidak terikat oleh kerjasama dan bantuan yang mengikat baik secara ideologis, politis maupun organisatoris. Muhammadiyah mengembangkan prinsip-prinsip kinerja profesional yang mengedepankan kompetensi dan sistem

meritokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam dalam seluruh amal usahanya.²⁸

4. Dakwah untuk Pemberdayaan Masyarakat: Problematika dan Tantangan

Walaupun secara sistemik Muhammadiyah memiliki pedoman dan prinsip-prinsip gerakan yang jelas, dalam pelaksanaannya tidaklah selalu mudah. Dengan segala prestasi dan kontribusinya, Muhammadiyah menyadari adanya berbagai masalah internal dan eksternal yang kompleks. Secara umum, Muhammadiyah mengalami tiga tantangan besar.

Pertama, tantangan sumberdaya manusia. Problem ini terutama terkait dengan ketersediaan tenaga profesional dan distribusi keahlian sesuai dengan ruang gerak Muhammadiyah yang sangat luas. Dengan jumlah amal usaha yang sangat besar Muhammadiyah memerlukan lebih banyak sumberdaya manusia yang mampu mengembangkan amal usaha dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman, profesionalisme dan tajdid. Tidak tersedianya sumberdaya manusia dengan kualifikasi tersebut membuat inovasi-inovasi atau tajdid Muhammadiyah berjalan sangat lambat, atau bahkan stagnan. Muhammadiyah terperangkap dalam rutinitas dan formalitas kegiatan.

Problem sumberdaya manusia ini memaksa Muhammadiyah merekrut kalangan "luar" sebagai tenaga "profesional". Kehadiran orang-orang "luar" tersebut sedikit

²⁸Abdul Mu'ti, Mengembangkan Pendidikan Muhammadiyah Menjadi Amal Shalih Profesional, dalam Edy Suandi Hamid, et.al., *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, (Yogyakarta: LPTP Muhammadiyah, 2002), hlm. 97.

banyak berpengaruh terhadap karakter gerakan Muhammadiyah. Perubahan-perubahan karakter gerakan Muhammadiyah dalam beberapa hal menyebabkan melemahnya spirit sosial dan amal di dalam Muhammadiyah serta "perubahan ideologi" gerakan. Seiring waktu, kecenderungan ini cenderung menguat. Karena itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu secara khusus menetapkan peraturan dan pedoman tentang konsolidasi ideologi dan organisasi. Muhammadiyah mengalami tantangan internal yang serius dengan trend radikalisme dan fundamentalisme keagamaan yang memiliki banyak kesamaan ciri-ciri eksternal dengan Muhammadiyah.

Kedua, problem sumberdana. Sumberdana utama Muhammadiyah berasal dari anggota dan kemampuannya di dalam mengembangkan jaringan. Dengan segala prestasinya, Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. kepercayaan tersebut dapat diukur dari jumlah wakaf dan aset-aset tidak bergerak yang diamanatkan oleh masyarakat kepada Muhammadiyah. Keterbatasan dana membuat banyak aset-aset tersebut belum teradministrasi, dikelola dan dikembangkan. Masih banyak aset-aset wakaf yang masih "perawan", belum tersentuh sama sekali.

Problem sumberdana juga berpengaruh terhadap perkembangan dan kualitas amal usaha yang tidak merata. Di satu sisi, prinsip kemandirian dengan sistem *bottom-up* mendorong pimpinan Persyarikatan untuk berlomba-lomba mendirikan amal usaha. Jumlah amal usaha Muhammadiyah sangat banyak. Tetapi, semangat membangun tersebut belum disertai semangat kebersamaan. Di dalam tubuh Muhammadiyah terdapat gejala ego-sektoral di mana pimpinan Persyarikatan "terfokus" pada pengembangan amal usaha sendiri dan lemah dalam kerjasama lintas sektoral.

Selain problem ego-sektoral, masalah keterbatasan sumberdana juga dipengaruhi oleh melemahnya semangat beramal di kalangan masyarakat. Sistem "ikhlas" yang menjadi ciri Muhammadiyah ternyata tidak cukup menarik bagi masyarakat yang hidup dalam alam pragmatisme dan materialisme. Selain masalah kultur, melemahnya etos beramal juga dipengaruhi oleh pengalaman Muhammadiyah yang banyak menerima "bantuan" dari pemerintah. Pada awalnya, dana pemerintah dijadikan oleh Muhammadiyah sebagai stimulan atau untuk akselerasi kegiatan. Lambat laun, sedikit atau banyak, pengembangan amal usaha dan kegiatan Muhammadiyah mulai tergantung pada sumber-sumber dana di luar anggota persyarikatan. Dalam level tertentu, pragmatisme ala partai politik telah merambah di dalam tubuh gerakan Muhammadiyah.

Ketiga, tantangan dunia global. Muhammadiyah dihadapkan pada perkembangan dunia global yang tidak selalu positif. Selama ini Muhammadiyah memang telah mampu menjalin kemitraan dengan dunia internasional, khususnya dalam bidang kemanusiaan, pendidikan dan kebudayaan. Beberapa lembaga internasional telah menjadikan Muhammadiyah sebagai mitra penting untuk program pembangunan dan perdamaian. Selama ini Muhammadiyah banyak bekerjasama dengan mitra-mitra internasional dari "Barat".

Kedekatan Muhammadiyah dengan lembaga-lembaga internasional "Barat" terkadang menimbulkan reaksi internal yang negatif. Meskipun kerjasama dengan Barat sudah dilakukan sejak jaman KH. Ahmad Dahlan (1912), di dalam sebagian anggota Muhammadiyah masih muncul anggapan bahwa kerjasama dengan Barat bisa menimbulkan peluruhan

ideologi terutama karena citra Barat yang sekuler. Situasi politik internasional turut memperkuat citra negatif tersebut.

Termasuk dalam tantangan global ini adalah situasi dan perkembangan politik dalam negeri. Muhammadiyah memang telah menyatakan dirinya netral dengan semua partai politik. Tetapi, sistem demokrasi yang sangat terbuka ternyata membuat warga Muhammadiyah tersedot ke ranah politik praktis. Di satu sisi, keterlibatan politik merupakan perkembangan positif. Tetapi, pada sisi yang lain, keterlibatan aktif tersebut bisa menimbulkan tarik-ulur kepentingan yang tidak mudah diselesaikan. Di satu sisi, Muhammadiyah sangat berkepentingan dengan eksistensi politik sebagai sayap dakwah. Tetapi, pada sisi yang lainnya, Muhammadiyah belum memiliki kultur demokrasi yang cukup solid untuk mensinergikan perbedaan afiliasi politik sebagai kekuatan jaringan yang konstruktif untuk dakwah.

5. Catatan Akhir

Sampai saat ini, Muhammadiyah tetap konsisten dengan identitas dan kepribadiannya sebagai gerakan sosial-keagamaan. Muhammadiyah sudah banyak berbuat. Tetapi, dalam banyak aspek, amal usaha, program dan kegiatan Muhammadiyah belum cukup untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Muhammadiyah perlu lebih banyak bekerja untuk meningkatkan kualitas amal usaha sebagai ladang pengabdian untuk pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan sumberdaya manusia dan maksimalisasi sumberdana. Muhammadiyah perlu dan merasa sangat perlu untuk lebih membuka diri dan percaya diri membangun jaringan kerjasama

dengan berbagai pihak yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat.

DISKUSI

Komentar dan Pertanyaan Peserta

- (1) Dalam pemilu 2009, Jusuf Kalla (JK) didukung oleh NU dan Muhammadiyah. Dalam penghitungan suara, faktanya JK ternyata kalah. Apakah fenomena ini menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah mulai ditinggalkan umatnya? Makna apa sebenarnya yang dapat diambil di sini? Ataukah dalam politik praktis, PKB dan PAN dianggap lebih sukses dibanding dengan NU dan Muhammadiyah? Kemungkinan lain, apakah dukungan yang diberikan kepada JK, lebih bersifat individu daripada lembaga?
- (2) Adakah optimisme yang dapat dibangun menanggapi NU dan Muhammadiyah yang belakangan dianggap "menurun" perannya? Adakah sesuatu yang baru di luar *trade mark* lama yang selama ini ditawarkan NU dan Muhammadiyah dalam proses pemberdayaan masyarakat saat ini? Seperti pidato Cak Nur tahun 70-an, NU dan Muhammadiyah menurutnya tidak lagi menjadi pembaharu. Apa yang akan dilakukan NU dan Muhammadiyah seiring dengan memudarnya peran mereka di masyarakat? Terlebih, dengan semakin menguatnya peran dari organisasi-organisasi Islam yang baru dan masih kecil. Perlukah saat ini masyarakat mengidentifikasi afiliasinya sebagai NU atau Muhammadiyah?
- (3) Di sekolah, NU mengajarkan paham *rahmatan lilalamin* yang menganggap umat lain sama sehingga sangat toleransi.

Sedangkan, di Muhammadiyah sepertinya mengajarkan sesuatu yang lebih “keras”. Benarkah demikian? Mengapa?

- (4) Fenomena yang ada menunjukkan bahwa melemahnya ormas dan otoritas ulama lebih banyak disebabkan oleh semakin derasnya demokratisasi dan modernisasi yang masuk ke lingkungan pesantren maupun ormas Islam. Dalam hal ini, sejauh mana isu-isu demokrasi diterima oleh NU dan Muhammadiyah? Isu-isu tersebut banyak diusung oleh lembaga-lembaga pemberi dana internasional. Lantas, bagaimana ormas khususnya NU yang sering menerima bantuan internasional, menjaga independensinya dalam konteks ini? Bagaimana NU dan Muhammadiyah memposisikan diri dalam konteks ini? Belakangan NU dan Muhammadiyah merasa sama-sama kehilangan masjid, bagaimana keduanya menanggapi hal ini?

Tanggapan Pembicara:

Dr. Endang Turmudi

Pengambilalihan masjid memperlihatkan isu gerakan transnasional di tingkat nasional. Gerakan transnasional memang banyak yang mengejawantah dalam gerakan Islam yang lebih berorientasi Wahabisme. Pengambilalihan beberapa masjid NU jelas menimbulkan kegelisahan di masyarakat NU lapisan bawah. Muhammadiyah pun mengalami kegelisahan yang sama, seperti pengambilalihan masjid Muhammadiyah di Ponorogo oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oleh karena itu, *lailatul ijtima'* di NU mulai digerakkan kembali untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang ada di sekitarnya, termasuk maraknya gerakan Islam, baik yang dilakukan individu maupun organisasi tertentu, seperti kemunculan “dai kompor”. Apa yang dilakukan “dai kompor”, secara spirit

memang meyakinkan, tapi secara ideologi mereka kurang memahami substansi dalam Islam. Dalam hal membaca Alquran saja, mereka tidak fasih.

NU memang banyak bekerja sama dengan pemberi dana, tetapi NU masih dapat menjaga ideologinya dengan baik.

NU sebagai ormas sudah menyatakan diri kembali ke *khittah* sehingga tidak lagi berpolitik praktis atau partisan. Yang dilakukan oleh NU saat ini adalah politik ummatan, bukan golongan. Tetapi, NU memberikan kebebasan bagi anggota-anggotanya yang ingin berpolitik melalui parpol yang berafiliasi dengan NU.

Kekalahan JK memang disebabkan oleh dukungan persona. JK adalah orang NU sehingga wajar kalau Hasjim mendukung. Yang perlu diperhatikan, dukungan tersebut tidak secara formal melalui lembaga. Kasus Hasjim juga menunjukkan adanya politisasi. Tayangan dukungan Hasjim kepada JK itu sebenarnya sebuah politisasi yang dilakukan oleh agen iklan yang dimiliki anak salah seorang kyai.

Anak-anak muda NU sekarang memang banyak yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan paham NU. Memang banyak politisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap NU.

Ke depan, saya optimis dengan NU karena masih memiliki dukungan massa yang sangat besar. NU hanya tinggal mengayomi kader-kadernya dengan baik.

Dr. Abdul Mukti

Kasus JK sebenarnya tidak hanya melibatkan NU dan Muhammadiyah, tetapi juga ormas-ormas agama yang lain.

Sayangnya, JK memang kalah sehingga pada kongres Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Mamassa banyak dibahas tentang kurang berpengaruhnya para pemimpin agama di mata masyarakat saat ini. Dalam analisis saya, hal ini tampaknya dipengaruhi oleh tiga kemungkinan yang ke depan perlu diteliti lebih jauh.

Pertama adalah pergeseran otoritas pemimpin agama di dalam masyarakat, baik menyangkut politik maupun keagamaan. Secara positif hal ini dapat ditengarai sebagai penanda bahwa masyarakat sudah mandiri dalam pengambilan keputusan seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan.

Kedua adalah masalah kultur. Sikap kenetralan Muhammadiyah seringkali diartikan umatnya sebagai sikap antipati politik sehingga warga Muhammadiyah memiliki keengganan untuk ikut berpolitik. Di masyarakat sendiri masih terdapat pencitraan yang buruk tentang politik, seperti konflik yang dinilai kurang sejalan dengan prinsip *akhlakul karimah*. Netralitas Muhammadiyah inilah yang menyebabkan komando politik yang diberikan Muhammadiyah tidak dapat secara langsung memiliki implikasi terdapat warganya. Tahun 2004 secara eksplisit Muhammadiyah mendukung Amien Rais, tapi tetap saja kalah. Tahun 2009, Muhammadiyah tidak secara langsung mendukung JK, tetapi menerbitkan sembilan kriteria calon presiden yang memenuhi idealisme Muhammadiyah. Karakter ke sembilan yang menyatakan "dekat dengan perjuangan umat Islam" inilah yang mendukung JK secara implisit karena dalam lima tahun terakhir JK lebih dekat dengan Muhammadiyah daripada SBY.

Ketiga, ada faktor pragmatisme di masyarakat. Saat ini, ada sinyalemen yang menunjukkan bahwa kyai *khos* kalah dengan kyai *kas*. Masyarakat sekarang menjadi sangat *greedy*

dalam berpolitik. Semua calon didukung demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, masyarakat lebih banyak memilih bukan karena idealisme, tetapi *cash & carry*.

Risiko dari organisasi besar adalah kurangnya liputan media terhadap kegiatan-kegiatannya, terlebih jika kegiatan tersebut merupakan hal yang "biasa". Di Muhammadiyah sendiri, kegiatan-kegiatan yang sifatnya benar-benar baru memang terbatas. Ada tiga hal yang dapat dikatakan baru di Muhammadiyah, yaitu (1) Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang mulai dikembangkan setelah muktamar di Malang. Majelis ini bertugas untuk melakukan pendampingan masyarakat petani, nelayan, dan lain-lain; (2) Kesatuan untuk kemanusiaan, seperti Muhammadiyah Disaster Center (MDC) yang menyediakan relawan dan program-program penanggulangan bencana yang salah satunya bermitra dengan Asia Foundation; (3) Ada juga Muhammadiyah Children Center (MCC) yang dibentuk pasca tsunami Aceh. Program-program ini amat sangat baru dan keluar dari *core business* Muhammadiyah.

Muhammadiyah memang terpasang pada pemahaman lama. Muhammadiyah sekarang sedang mencoba untuk membahasakan amar ma'ruf nahi munkar dalam gerakan-gerakan "modern" yang konkret. Oleh karena itu, pernyataan Kuntowijoyo tentang konkretisasi ajaran-ajaran Islam ke dalam berbagai kegiatan yang memiliki landasan teologis mutlak dilakukan. Misal, bagaimana mencari legitimasi kegiatan penanggulangan *human trafficking* dari ajaran Islam dan bukan atas dasar pemberi dana.

Sebagian besar menganggap bahwa mengidentifikasi diri sebagai NU dan Muhammadiyah masih penting. Namun, pengkutuban NU dan Muhammadiyah semakin mencair karena

adanya pendidikan dan faktor sosial. Penguatan pluralisme bahkan menjadikan orang semakin mudah bergaul (*easy going*).

Banyak masyarakat yang memilih Muhammadiyah sebagai media pendidikan. Hal ini lebih didasarkan alasan pragmatis bahwa Muhammadiyah dianggap memiliki kualitas pendidikan yang baik dibanding dengan sekolah-sekolah lainnya. Oleh karena itu, siswa-siswa Muhammadiyah pun tidak terbatas pada siswa Muslim, tetapi juga siswa beragama lain, seperti Kristen. Selain itu, di Muhammadiyah bahkan ada kelompok *walantardho*, yaitu Kristen dan Yahudi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa berdirinya Muhammadiyah sebagai respon terhadap misi kristenisasi. Tetapi dari sumber-sumber lain, seperti tulisan Alwi Shihab dan madzab-madzab klasik, bukan Kristen yang ditentang oleh Muhammadiyah, tetapi kolonialisme yang menggunakan simbol-simbol Kristen. Seperti disebut oleh Abdul Munir Mulkhan, hal yang semacam ini hanya ditunjukkan oleh kelompok Muhammadiyah ikhlas yang sangat puritan. Kelompok ini tidak hanya keras terhadap umat dari agama lain, tetapi juga kepada kelompok Islam sendiri yang memiliki perbedaan haluan.

Selain menyebut kelompok di atas, Abdul Munir Mulkhan juga menyebutkan bahwa di Muhammadiyah terdapat tiga kelompok lain, yaitu Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang puritan, inklusif, dan substansialis; Muhammadiyah NU (Munu); serta Marhaenis Muhammadiyah (Marmud). Selain itu, ada juga Kristen Muhammadiyah, yaitu orang-orang Kristen yang sangat mendukung Muhammadiyah.

Menurut saya, Muhammadiyah sangat positif terhadap demokrasi. Muhammadiyah tidak ada masalah dengan tiga prinsip demokrasi, yaitu egalitarianisme, transparansi, dan kebebasan. Ketiga prinsip tersebut bahkan sudah melekat di

Muhammadiyah sejak awal. Ada tiga dosa besar dalam Muhammadiyah, yaitu korupsi, poligami, dan murtad.

Sebenarnya masjid Muhammadiyah yang hilang tidak terlalu banyak. Hal ini menjadi persoalan karena tumbuh di dalam, bahkan menimbulkan konflik terbuka. Awalnya, Muhammadiyah melihat PKS murni sebagai parpol, sampai PKS secara sangat berani ikut serta menetapkan Idul Fitri. Sejak saat itu, barulah Muhammadiyah berpikir bahwa PKS bukan hanya sekedar parpol, melainkan juga ideologi agama tertentu. Memang, banyak anak-anak dari pengurus Muhammadiyah yang kini beralih ke PKS dan tidak lagi aktif di semua organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengadakan penertiban administrasi melalui konsolidasi ideologi. Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan penertiban organisasi sehingga setiap amal usaha Muhammadiyah harus mencantumkan nama Muhammadiyah secara eksplisit, misalnya “Panti Asuhan Muhammadiyah Nurul Rahmah”.

P E N U T U P

Dr. Muhamad Hisyam

② gagasan diselenggarakannya seminar ini, berawal dari kerja sama PMB LIPI dan ILCAA TUFS, berupa riset yang kami kerjakan bersama-sama tentang *Muncul dan Berkembangnya Paham-paham Keagamaan Islam di Indonesia*. Fenomena di era Reformasi menunjukkan adanya organisasi-organisasi Islam baru yang muncul dan sangat berbeda dengan organisasi-organisasi Islam yang sudah lama ada. Tahun 2008 kami mengadakan seminar yang khusus membicarakan tiga organisasi “baru”, yaitu Dakwah Salafi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jaringan Islam Liberal (JIL). Agaknya tema inilah yang juga menjadi kajian dari PPIM UIN. Dalam hal ini, PPIM UIN Jakarta bersama Asia Foundation juga mengadakan penelitian tentang organisasi massa (ormas) Islam. Tema ini memang sangat penting untuk didiskusikan. Saat ini, ormas Islam tidak hanya NU dan Muhammadiyah. Saat ini, terdapat banyak sekali variasi ormas mulai dari yang liberal hingga yang konservatif. Bahkan, sejak Reformasi, ormas Islam yang sudah lama ada mengalami banyak perubahan di tingkat internal. Hal ini terjadi karena beberapa partai politik (parpol) bermula dari ormas. Secara formal, pasti terdapat perbedaan antara ormas dan parpol, tetapi secara praktik hal tersebut sulit dibedakan. Sangat menarik untuk mengkaji sejauh mana sebenarnya ormas dapat berperan dalam agenda transformasi sosial di Indonesia. Oleh karena itu, sebuah riset yang mengkaji peran ormas menjadi penting untuk dikerjakan.

Jika seminar tahun 2008, kita memperbincangkan kemunculan organisasi-organisasi Islam di era Reformasi, maka seminar hari ini sebenarnya membicarakan implikasi dari fenomena tersebut terhadap organisasi-organisasi yang telah mapan. Oleh karena itu, kerja sama antara PMB LIPI dengan PPIM UIN dalam seminar hari ini memang sangat tepat. Diskusi semacam ini sangat baik karena akan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perubahan yang terjadi terhadap peran ormas Islam di era Reformasi.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/ Ibu yang berkenan hadir dan menjadi partisipan aktif pada seminar hari ini: *Membincang Ulang Peran Sosial Politik Organisasi Keagamaan Islam di Era Reformasi*. Terima kasih lebih khusus kami sampaikan kepada seluruh pembicara hari ini, Pak Bachtiar, Pak Hendro, Pak Anas, Pak Endang, dan Pak Mu'ti yang telah memberikan paparan yang secara keseluruhan sangat menarik.

Terima kasih kepada Prof. Koji MIYAZAKI dan Dr. Kazuhiro ARAI. Terima kasih kepada Kepala PMB LIPI dan Direktur PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tak terlupakan, terima kasih juga kepada seluruh anggota panitia yang dengan hati-hati dan serius menyiapkan dan menyelenggarakan seminar ini.



